

KEKERASAN POLITIK ELEKTORAL DI TINGKAT LOKAL
(Studi Kasus Pemilu di Kabupaten Sampang Tahun 2024)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Program Studi Pemikiran
Politik Islam



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

GHUFRON
NIM : 07040420024

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Kekerasan Politik Elektoral di Tingkat Lokal : Studi Kasus Pemilu di Kabupaten Sampang Tahun 2024” yang ditulis oleh Ghufron ini telah disetujui pada tanggal 08 Januari 2024

Surabaya, 08 Januari 2024

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DR. ANDI SWARKO', with a stylized flourish at the end.

DR. ANDI SWARKO M.S
NIP. 197411102003121004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Kekerasan Politik Elektoral di Tingkat Lokal : Studi Kasus Pemilu di Kabupaten Sampang Tahun 2024” yang ditulis oleh Ghuftron ini telah disetujui pada tanggal 08 Januari 2024

Tim Penguji:

1. Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si. (Ketua)
2. Dr. Khoirul Yahya, M.Si. (Sekretaris)
3. Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si. (Penguji I)
4. Dr. Ahmas Khoirul Fata, M.Fil.I (Penguji II)

.....
.....
.....
.....



Surabaya, 08 Januari 2024
Dekan

Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ghuftron

NIM : 07040420024

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.



Surabaya, 10 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



GHUFRON
NIM : 07040420024

MOTTO

Kekuasaan tanpa kesadaran etis melahirkan kekerasan, sementara pengetahuan menjadi jalan menuju demokrasi yang berkeadaban. Terus belajar, tetap rendah hati, dan jangan pernah menyerah.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu dan bapak tercinta yang telah berjuang dan memotivasi serta mendoakan aku dalam kebaikan. Kasih sayangmu tak terbalaskan.
2. Semua saudaraku yang telah mendukung selama perjalanan kuliahku.
3. Teman-teman sekelas, tanpa terkecuali, semoga *antum* semua menjadi sang pendidik masyarakat sekaligus teladan yang menginspirasi kebaikan.

RIWAYAT HIDUP

Nama : **GHUFRON**

Tempat, tanggal lahir : Sampang, 14 April 2000

Alamat : Jl. Pelenggiyan Kedungdung Sampang Jawa Timur

Nomer HP : 0817-1782-4554

Pendidikan : 1. MI Miftahul Mustarsyidin Kedungdung Sampang
2. MTs Miftahul Mustarsyidin Kedungdung Sampang
3. MA Baitussholeh Kedungdung Sampang

Pengalaman : 1. Mengajar di Miftahul Mustarsyidin
2. Petugas KPPS Pemilu 2024
3. Talent Channel Mata Pena

ABSTRAK

Ghufron, 2025. "Kekerasan Politik Elektoral di Tingkat Lokal: Studi Kasus Pemilu di Kabupaten Sampang Tahun 2024". Skripsi Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Kekerasan Politik Elektoral, Pilkada, Patronase Politik, Demokrasi Lokal, Kabupaten Sampang

Penelitian ini mengkaji kekerasan politik elektoral dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang sebagai fenomena sosial-politik yang bersifat struktural dan kontekstual. Kabupaten Sampang dipilih karena memiliki sejarah konflik politik lokal serta karakter masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh patronase keagamaan dan aktor informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan politik elektoral, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan selama proses Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, pengurus partai politik, tim kampanye, relawan, dan masyarakat umum, serta didukung oleh dokumentasi dan pemberitaan media. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Kerangka teoritis bertumpu pada Teori Kekerasan Politik Charles Tilly, diperkuat oleh Teori Konflik Lewis A. Coser dan Teori Patronase James C. Scott. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan politik elektoral di Sampang termanifestasi dalam berbagai bentuk, meliputi kekerasan non-fisik dan intimidasi sosial, kekerasan simbolik berbasis budaya lokal, kekerasan struktural melalui relasi patronase politik, kekerasan verbal dan polarisasi sosial, kekerasan digital melalui hoaks, serta kekerasan fisik sebagai puncak eskalasi konflik. Kekerasan tersebut dipengaruhi oleh fanatisme politik berbasis tokoh, budaya patronase, persaingan elite lokal, lemahnya literasi politik, praktik politik uang, serta peran media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang mencerminkan lemahnya institusionalisasi demokrasi lokal, sehingga diperlukan pendekatan pencegahan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

“Kekerasan Politik Elektoral di Tingkat Lokal: Studi Kasus Pemilu di Kabupaten Sampang Tahun 2024”

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk melanjutkan ke tahap penelitian dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bantuan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
2. Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
3. Bapak M. Anas Fahrudin, S.Th.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam.
4. Dr. Andi Swarko M.S, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun sistematika. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di tahap berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik demokrasi yang lebih etis dan bermartabat.

Surabaya, 29 September 2025

Ghufron

DAFTAR ISI

ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Definisi Konseptual	24
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	29
A. Penelitian Terdahulu	29
1. Kerangka Teoritik	37
a. Teori Kekerasan Politik.....	38
b. Teori Konflik.....	41
c. Teori Patronase dan Klientelisme Politik	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
B. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	42
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Deskripsi Pilkada Kabupaten Sampang 2024	44
B. Bentuk Kekerasan Politik Elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang.....	57
C. Faktor-Faktor Kekerasan Politik Elektoral pada Pemilu 2024.....	81
D. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Politik Elektoral	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan.....	113

B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR TABEL

Table 1. Kasus Kekerasan Politik di Kabupaten Sampang Tahun 2014-2024.....	3
Table 2. Daftar Informan.....	32
Table 3. Tahapan Persiapan Pilkada	40
Table 4. Tahapan Pencalonan Pilkada.....	40
Table 5. Partai Politik Pengusung Manda	43
Table 6. Partai Politik Pengusung Jimat	44
Table 7. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Sampang	47
Table 8. Susunan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang	48
Table 9. Tingkat Kerawanan Pemilu 2024.....	50
Table 10. Insiden Kekerasan Politik di Sampang	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Korban Terjatuh setelah dibacok.....	52
Gambar 2. Suasana saat Permasalahan C6.....	54
Gambar 3. Keributan Jelang Pilkada Sampang 2024.....	59
Gambar 4. Suasana Dua Lurah Dilaporkan ke Bkpsdm Sampang.....	62
Gambar 5. Pesan Suara Provokatif di WhatsApp.....	66
Gambar 6. Gambar Black Campaign saat Pilkada Sampangng	69
Gambar 7. Suasana saat Penyerangan di Ketapang Laok	61
Gambar 8. Bentuk Fanatisme Politik	74
Gambar 9. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sampang	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk menyalurkan kehendak politik masyarakat secara damai dan bermartabat. Namun, dalam praktiknya, proses elektoral di berbagai daerah di Indonesia kerap diwarnai oleh konflik dan kekerasan politik. Persaingan antaraktor politik yang seharusnya berlangsung melalui adu gagasan dan program sering kali berubah menjadi mobilisasi emosional massa, intimidasi, serta tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan warga negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya diiringi dengan internalisasi nilai-nilai demokrasi substantif di tingkat masyarakat.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Di daerah ini, kontestasi elektoral tidak hanya melibatkan persaingan antarcalon, tetapi juga berkelindan dengan struktur sosial lokal yang kuat, seperti patronase keagamaan, jaringan sosial masyarakat, dan peran aktor-aktor informal. Memasuki masa kampanye hingga hari pemungutan suara, eskalasi konflik di Sampang semakin terlihat di lapangan. Sejumlah peristiwa seperti keributan di tempat pemungutan suara, intimidasi terhadap saksi dan penyelenggara pemilu, ancaman penggunaan senjata tajam, serta penyebaran isu dan hoaks terkait kecurangan pemilu menciptakan suasana politik yang tidak kondusif.

Puncak eskalasi kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang terjadi pada 17 November 2024, ketika suasana tahapan Pilkada memuncak di Desa Ketapang Laok,

Kecamatan Ketapang. Pada hari itu, rombongan calon bupati Slamet Junaidi bersama timnya melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Babussalam yang diasuh oleh seorang tokoh agama setempat, Kiai Mualif. Kunjungan ini awalnya berupa silaturahmi politik, namun kemudian memicu gesekan antarkelompok yang dikaitkan dengan relasi kiai setempat. Saat rombongan hendak meninggalkan lokasi, terjadi blokade jalan oleh pihak lain yang dipimpin oleh Kiai Hamduddin, yang diduga merasa tersinggung karena kunjungan itu. Blokade ini dilakukan dengan menggunakan mobil dan potongan kayu untuk menghalangi akses keluar dari lokasi pesantren. Ketegangan muncul ketika kedua kelompok saling bersinggungan secara verbal dan fisik.¹

Dalam situasi tersebut, salah seorang saksi pasangan calon, Jimmy Sugito Putra, muncul dalam perdebatan yang makin memanas. Ia sempat terlibat upaya meredakan kekisruhan dan mencoba melindungi seorang rekan bernama Asrofi dari serangan massa yang makin agresif. Namun, konflik verbal berkembang menjadi kekerasan fisik ketika massa yang diperkirakan membawa senjata tajam semakin banyak berdatangan dari arah kediaman pihak penghadang. Akibat eskalasi kekerasan tersebut, Jimmy kemudian dikejar dan diserang oleh kelompok yang melakukan pengeroyokan dengan senjata tajam celurit, sehingga ia mengalami luka bacokan di sekujur tubuhnya. Korban yang semula sempat dilarikan ke RSUD Ketapang di Sampang untuk mendapatkan pertolongan medis akhirnya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.²

¹ Praditya Fauzi Rahman, *"Kronologi Lengkap Pembacokan Hingga Tewas Saksi Cabup Sampang," DetikJatim*, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7650529/kronologi-lengkap-pembacokan-hingga-tewas-saksi-cabup-sampang>.

² Rahman.,

Peristiwa ini menjadi kasus paling fatal dalam rangkaian konflik Pilkada di Sampang 2024 dan terekam luas di media sosial serta menjadi perhatian aparat kepolisian yang kemudian menangkap beberapa tersangka pelaku setelah kejadian itu. Selain kasus pembunuhan tersebut, Pemilu 2024 di Sampang juga diwarnai oleh berbagai insiden lain, seperti hoaks surat suara tercoblos, ancaman carok terhadap petugas KPPS, serta keributan akibat perbedaan data pemilih. Jika ditinjau secara historis, kekerasan politik di Sampang bukanlah fenomena baru. Sejak Pemilu 2014 hingga 2024, tercatat berbagai insiden kekerasan politik yang berulang, baik dalam pemilu legislatif, pilpres, maupun pilkada, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut.

Table 1. Kasus Kekerasan Politik di Kabupaten Sampang Tahun 2014-2024

No	Tahun	Pemilu Eksekutif	Pemilu Legislatif	Keterangan
1	2014	Kericuhan DPT Bermasalah saat Pilpres – TPS 14 Kelurahan Gunung Sekar, warga marah karena tidak bisa memilih.	Ketegangan Penghitungan Ulang – 17 TPS di Ketapang Barat, protes dugaan manipulasi suara caleg.	Warga menyerbu TPS, terjadi dorong-dorongan dengan petugas, pengamanan diperketat.
2	2014	-	Pemilu Ulang Gagal Digelar (Robatal) – Panitia takut akibat intimidasi politik dua kubu caleg.	Ancaman fisik terhadap KPPS, indikasi tekanan sosial; aparat hentikan proses.
3	2014	Isu “Nol Suara Jokowi” di Ketapang – protes massa pasca Pilpres 2014.	-	Massa hampir bentrok, aparat siaga di kantor PPK.
4	2019	-	Penembakan saat Pileg 2019 (Banyuates, Tapaan Tengah) – bentrok saksi caleg, satu orang tertembak di tangan.	Massa membawa senjata api dan tajam; korban luka tembak, kasus dilimpahkan ke Polda Jatim.
5	2019	-	Pencurian Kotak Suara (Robatal) – dua pelaku	Aksi ini menimbulkan kejar-kejaran dan

			kabur membawa kotak suara, dikejar TNI-Polri.	ancaman kekerasan; kotak suara diamankan.
6	2019	-	Surat Suara Tercoblos Sebelum Waktu (Trapang, Camplong)	Protes massa, dilakukan PSU di 3 TPS; potensi bentrokan antarpendukung.
7	2019	Pilkades Serentak 38 Desa (21 Nov 2019) – bentrok kecil di beberapa desa.	-	Polisi amankan senjata tajam; tidak ada korban jiwa tapi situasi tegang.
8	2024	Hoaks Surat Suara Tercoblos (Feb 2024, Pilpres) – warga marah di Gunung Kesan, Karang Penang.	-	Kekerasan verbal terhadap petugas; hoaks memicu potensi bentrok.
9	2024	Pembacokan Saksi Paslon (17 Nov 2024, Pilkada Sampang) – saksi “Jimat Sakteh” tewas dikeroyok.	-	Kasus paling fatal: korban meninggal dunia; pelaku bersenjata tajam.
10	2024	Keributan C6 Tidak Sesuai (27 Nov 2024, TPS Tanggumong)	-	Warga protes ke KPPS, terjadi adu mulut dan satu warga pingsan; situasi dikendalikan aparat.
11	2024	Pria Bercelurit Ancam “Carok” (Robatal)	-	Warga ancam petugas karena tak dapat undangan memilih; polisi buru pelaku.
12	2024	Provokasi Lewat Rekaman Suara	-	Pesan ajak “siapkan senjata”
13	2024	Video Penganiayaan Viral	-	Rekaman penganiayaan beredar luas
No	Tahun	Pemilu Eksekutif	Pemilu Legislatif	Keterangan
1	2014	Kericuhan DPT Bermasalah saat Pilpres – TPS 14 Kelurahan Gunung Sekar, warga marah karena tidak bisa memilih.	Ketegangan Penghitungan Ulang – 17 TPS di Ketapang Barat, protes dugaan manipulasi suara caleg.	Warga menyerbu TPS, terjadi dorong-dorongan dengan petugas, pengamanan diperketat.
2	2014	-	Pemilu Ulang Gagal Digelar (Robatal) – Panitia takut akibat	Ancaman fisik terhadap KPPS, indikasi tekanan

			intimidasi politik dua kubu caleg.	sosial; aparat hentikan proses.
3	2014	Isu “Nol Suara Jokowi” di Ketapang – protes massa pasca Pilpres 2014.	-	Massa hampir bentrok, aparat siaga di kantor PPK.
4	2019	-	Penembakan saat Pileg 2019 (Banyuates, Tapaan Tengah) – bentrok saksi caleg, satu orang tertembak di tangan.	Massa membawa senjata api dan tajam; korban luka tembak, kasus dilimpahkan ke Polda Jatim.
5	2019	-	Pencurian Kotak Suara (Robatal) – dua pelaku kabur membawa kotak suara, dikejar TNI-Polri.	Aksi ini menimbulkan kejar-kejaran dan ancaman kekerasan; kotak suara diamankan.
6	2019	-	Surat Suara Tercoblos Sebelum Waktu (Trapang, Camplong)	Protes massa, dilakukan PSU di 3 TPS; potensi bentrokan antarpendukung.
7	2019	Pilkades Serentak 38 Desa (21 Nov 2019) – bentrok kecil di beberapa desa.	-	Polisi amankan senjata tajam; tidak ada korban jiwa tapi situasi tegang.
8	2024	Hoaks Surat Suara Tercoblos (Feb 2024, Pilpres) – warga marah di Gunung Kesan, Karang Penang.	-	Kekerasan verbal terhadap petugas; hoaks memicu potensi bentrok.
9	2024	Pembacokan Saksi Paslon (17 Nov 2024, Pilkada Sampang) – saksi “Jimat Sakteh” tewas dikeroyok.	-	Kasus paling fatal: korban meninggal dunia; pelaku bersenjata tajam.
10	2024	Keributan C6 Tidak Sesuai (27 Nov 2024, TPS Tanggumong)	-	Warga protes ke KPPS, terjadi adu mulut dan satu warga pingsan; situasi dikendalikan aparat.
11	2024	Pria Bercelurit Ancam “Carok” (Robatal)	-	Warga ancam petugas karena tak dapat undangan memilih; polisi buru pelaku.
12	2024	Provokasi Lewat Rekaman Suara	-	Pesan ajak “siapkan senjata”

13	2024	Video Penganiayaan Viral	-	Rekaman penganiayaan beredar luas
----	------	--------------------------	---	-----------------------------------

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Pola ini mengindikasikan bahwa kekerasan politik elektoral di Sampang bersifat berulang dan terstruktur. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik dan kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang merupakan persoalan serius dalam praktik demokrasi lokal. Kuatnya patronase sosial-keagamaan, peran aktor informal, serta lemahnya internalisasi nilai demokrasi substantif menciptakan lingkungan politik yang rawan konflik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bentuk serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang pada Pemilu 2024, sekaligus merumuskan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti kekerasan politik di Madura maupun di Sampang. Istifarin, melalui penelitian tentang Pilkades di Desa Ketapang Laok, menemukan bahwa kekerasan politik di tingkat lokal merupakan pola yang mengakar dalam mekanisme patronase antara elite dan masyarakat.³ Sila menjelaskan bahwa relasi antara kiai dan blater membentuk koalisi sosial yang memadukan legitimasi moral dan kekuatan koersif sehingga menciptakan potensi kekerasan yang dilembagakan secara kultural.⁴ Nurish menekankan bahwa fanatisme dan kecemasan

³ | Istifarin, *"Fenomena Politik Kekerasan Dalam Pilkades Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura"* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁴ Muhammad Adlin Sila, *"Kiai Dan Blater: Antara Kesalehan Dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Lokal Di Madura,"* *Studia Islamika* 26, no. 1 (2019): 185–200.

kolektif dapat memicu tindakan ekstrem ketika diaktualisasikan dalam konteks mobilisasi politik.⁵

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji bentuk kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang, faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang mendorong terjadinya kekerasan tersebut, serta upaya pencegahan dan penanganannya oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih aktual dan komprehensif mengenai dinamika kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang pada Pemilu 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan. Pertama, penelitian sebelumnya lebih fokus pada kekerasan politik secara umum atau historis tanpa melihat integrasi faktor sosial keagamaan dalam pemilu terbaru. Kedua, belum ada pemetaan empiris mengenai bentuk kekerasan elektoral Sampang tahun 2024 yang memadukan pendekatan sosiologis dan politik. Ketiga, aspek emosional dan simbolik kekerasan seperti rasa takut, ketaatan terhadap figur religius, serta tekanan sosial masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah interaksi antara struktur sosial, budaya patronase, dan praktik politik lokal dalam membentuk kekerasan elektoral di Kabupaten Sampang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris dan analitis mengenai akar kekerasan politik lokal di Sampang, serta mengungkap bagaimana patronase keagamaan, jaringan blater, dan lemahnya regulasi demokrasi berinteraksi dalam menciptakan lingkungan politik yang rawan konflik. Pada akhirnya, penelitian

⁵ Amanah Nurish, *"Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan," Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 21, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>.

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi strategi pencegahan kekerasan elektoral dan penguatan demokrasi lokal yang lebih damai dan berkeadaban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kekerasan politik elektoral yang terjadi selama proses Pemilu di Kabupaten Sampang tahun 2024?
2. Bagaimana terjadinya kekerasan politik elektoral di Sampang, khususnya dalam konteks sosial, budaya, dan politik?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan politik elektoral dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Sampang?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk kekerasan politik elektoral yang terjadi selama proses Pemilu di Kabupaten Sampang tahun 2024, mencakup dinamika tindakan kekerasan, aktor yang terlibat, serta konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan politik elektoral di tingkat lokal, dengan menyoroti peran patronase keagamaan, jaringan sosial-blater, serta kondisi sosial-budaya masyarakat Sampang yang memengaruhi munculnya kekerasan selama Pemilu 2024.

3. Mengidentifikasi strategi pencegahan dan penanganan kekerasan politik elektoral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat, guna merumuskan langkah-langkah penguatan demokrasi lokal yang damai, partisipatif, dan berkeadaban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kekerasan politik elektoral dengan menunjukkan bahwa fenomena kekerasan tidak bersifat homogen, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kekerasan politik elektoral juga ditemukan di berbagai wilayah non-Madura, karakter dan mekanismenya di Kabupaten Sampang memiliki kekhasan tersendiri yang berakar pada struktur sosial-keagamaan, relasi patronase, serta dominasi aktor informal.

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman atas teori kekerasan politik Charles Tilly dengan menunjukkan bahwa kekerasan elektoral di konteks Madura tidak selalu termanifestasi dalam bentuk kekerasan fisik terbuka, tetapi lebih sering beroperasi melalui kekerasan simbolik, tekanan moral, dan relasi kuasa berbasis otoritas kultural. Hal ini membedakan kekerasan elektoral di Madura dari wilayah non-Madura yang cenderung menampilkan kekerasan secara lebih langsung dan instrumental.

Patronase dengan demikian, penelitian ini memperkaya perspektif teoretik tentang kekerasan politik elektoral dengan menempatkan dimensi

budaya, patronase keagamaan, dan aktor informal sebagai variabel penting dalam membaca dinamika kekerasan di tingkat lokal. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam memahami variasi kekerasan politik elektoral di Indonesia yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui pendekatan struktural atau institusional.

E. Definisi Konseptual

1. Kekerasan Politik

Kekerasan politik secara definisi merupakan tindakan atau ancaman kekuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memengaruhi, mempertahankan, atau menggugat kekuasaan politik.⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan politik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk simbolik dan psikologis yang menimbulkan rasa takut atau tekanan sosial.

Dalam konteks sosial Indonesia, kekerasan politik sering muncul sebagai bagian dari dinamika perebutan legitimasi kekuasaan. Sementara itu, kekerasan politik seringkali sebagai manifestasi dari hubungan patronase dan simbol kehormatan dalam budaya politik lokal. Menurut Gurr, “Kekerasan politik mengacu pada semua serangan kolektif dalam komunitas politik terhadap rezim politik, para aktornya, atau kebijakannya”.⁷

Dengan demikian, kekerasan politik dapat dipahami sebagai gejala sosial yang berakar pada relasi kekuasaan, ketimpangan sosial, dan budaya

⁶ Charles Tilly, *The Politics of Collective Violence* (Cambridge University Press, 2003).

⁷ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Routledge, 2015).

loyalitas kelompok, yang muncul dalam bentuk fisik, verbal, maupun simbolik selama kontestasi politik berlangsung.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum secara definisi dapat dipahami sebagai mekanisme politik yang memungkinkan rakyat menyalurkan kehendaknya secara langsung untuk menentukan arah kekuasaan dan kebijakan negara.⁸ Menurut Huntington, “Pemilu adalah inti dari demokrasi modern, pemilu merupakan sarana pemilihan pemimpin dan mekanisme akuntabilitas. Pemilu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan makna sosial dan kultural”.⁹

Definisi ini menunjukkan bahwa pemilu merupakan proses komunikasi politik massal yang mempertemukan kepentingan rakyat, elite, dan partai dalam ruang yang sama melalui simbol, isu, dan citra politik. Disisi lain, pemilu di Indonesia sering menjadi ajang mobilisasi sosial di mana hubungan patron-klien dan identitas lokal memainkan peran lebih dominan dibandingkan rasionalitas politik.

Dengan demikian pemilu dapat dipahami sebagai arena sosial di mana aktor politik, tokoh agama, dan masyarakat berinteraksi dalam logika budaya lokal, sebuah proses yang tidak hanya berorientasi pada legitimasi kekuasaan, tetapi juga pada pembentukan makna, loyalitas, dan solidaritas politik di tingkat akar rumput.

3. Politik Lokal

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003).

⁹ Samuel P Huntington, *The Third Wave*, vol. 199 (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

Politik lokal secara definisi dimaknai sebagai dinamika kekuasaan, pengaruh, dan representasi politik yang berlangsung dalam ruang sosial di tingkat daerah. Ia mencerminkan hubungan timbal balik antara aktor-aktor formal seperti pemerintah daerah dan lembaga legislatif dengan aktor-aktor informal seperti tokoh agama, patron, elit lokal, maupun kelompok sosial yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan politik.¹⁰ Dalam konteks ini, politik lokal tidak hanya terbatas pada aspek struktural pemerintahan, tetapi juga mencakup praktik kultural dan relasi kekuasaan yang membentuk perilaku politik masyarakat di tingkat lokal.

Menurut Tomoning, “Politik lokal secara umum didefinisikan sebagai seluruh kegiatan politik yang berkaitan dengan proses pembentukan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, politik lokal berada dalam lingkup di bawah politik nasional, di mana unit pemerintahan seperti kota, kabupaten, dan desa menjadi arena utama pengelolaan kekuasaan lokal. Pada tataran ini, intervensi pemerintah pusat bersifat terbatas karena setiap daerah memiliki otonomi serta regulasi lokal yang mengatur tata kelola politiknya sendiri”.¹¹

Dengan demikian, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa politik lokal terbentuk melalui interaksi antara struktur kekuasaan formal dan jaringan informal yang saling mempengaruhi dalam proses pembentukan keputusan

¹⁰ Leo Agustino, “Politik Lokal & Otonomi Daerah,” (*No Title*), 2014.

¹¹ Yeremias Tomoning, “POLITIK LOKAL Di TINGKAT DESA1 (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara),” *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 6 (2015).

politik di tingkat daerah. Semakin kuat peran aktor informal (seperti patron atau tokoh agama), semakin besar pula kecenderungan politik lokal untuk bersifat personalistik dan berorientasi pada jaringan kekuasaan, bukan semata pada mekanisme institusional formal.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah serta lebih spesifik dalam pembahasan skripsi ini, maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada “Kekerasan Politik Elektoral pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang Tahun 2024.”

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini akan diuraikan latar belakang penelitian yang membahas fenomena kekerasan politik elektoral dengan menampilkan rangkaian peristiwa kekerasan politik yang terjadi di Kabupaten Sampang. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang mencakup bentuk kekerasan politik elektoral, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut, serta upaya penanganannya. Selanjutnya, diuraikan pula tujuan penelitian yang hendak dicapai beserta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab II: Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kekerasan politik elektoral. Selain itu, bab ini diuraikan teori kekerasan politik Charles Tilly sebagai teori utama, serta teori konflik Lewis A. Coser dan teori patronase klientelisme politik James C.

Scott sebagai teori pendukung. Ketiga teori digunakan untuk menganalisis bentuk dan faktor pendorong kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang.

Bab III: Pada bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena fanatisme politik dan kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang.

Bab IV: Pada bab ini menyajikan dan menganalisis data penelitian mengenai kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang. Bab ini memuat gambaran setting penelitian yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik lokal, penyajian bentuk-bentuk kekerasan politik elektoral beserta faktor-faktor penyebabnya, serta upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori kekerasan politik Charles Tilly dengan didukung teori konflik Lewis A. Coser dan teori patronase klientelisme James C. Scott untuk menjelaskan dinamika, pola, dan akar kekerasan politik elektoral di tingkat lokal.

Bab V: Pada bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian mengenai kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang. Pada bab ini dirangkum temuan-temuan utama penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta disajikan saran-saran yang bersifat akademis dan praktis sebagai rekomendasi di masa mendatang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pra-riset dengan menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan topik ini. Setiap penelitian yang dikaji dijabarkan melalui rumusan masalah, teori, metode, serta hasilnya, kemudian dibandingkan dengan fokus dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pertama, Penelitian Istifarin berjudul “Fenomena Politik Kekerasan dalam Pilkades di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang” meneliti bentuk, penyebab, dan dampak kekerasan politik dalam konteks pemilihan kepala desa di Madura. Rumusan masalah penelitian ini terdiri atas dua hal utama yaitu bagaimana bentuk kekerasan politik yang terjadi dalam Pilkades di Desa Ketapang Laok serta apa motif yang melatarbelakangi munculnya kekerasan politik tersebut. Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama yaitu teori Fenomenologi Alfred Schutz, yang digunakan untuk memahami makna subjektif dan kesadaran sosial masyarakat terhadap tindakan kekerasan serta teori Kekerasan Johan Galtung, yang membedakan tiga bentuk kekerasan: langsung (fisik), struktural (institusional), dan kultural (normatif). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis dengan jenis deskriptif-analitis.¹

¹ Istifarin, “Fenomena Politik Kekerasan Dalam Pilkades Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura.” (Skripsi – Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 38.

Sementara, hasil penelitian ini menemukan bahwa kekerasan politik dalam Pilkades di Desa Ketapang Laok memiliki bentuk dan motif yang kompleks, mencerminkan interaksi antara kekuasaan lokal, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Kekerasan fisik muncul dalam bentuk carok (pembunuhan), pemukulan, serta perusakan fasilitas desa akibat ketidakadilan dan kecurangan dalam pemilihan. Sementara itu, kekerasan non-fisik berupa intimidasi, ancaman, diskriminasi, dan tekanan sosial terhadap pemilih menunjukkan adanya kekerasan simbolik dan struktural. Motif utama kekerasan berasal dari dendam politik, fanatisme terhadap calon, serta ketimpangan kekuasaan yang diperkuat oleh budaya patron-klien dan nilai ajhina (harga diri) sebagai legitimasi pembelaan kehormatan. Kekerasan ini tidak hanya antarindividu, tetapi telah dilembagakan dalam struktur sosial melalui dominasi elit lokal dan loyalitas politik yang menekan kebebasan warga. Dampaknya adalah keretakan sosial, trauma masyarakat, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi desa, menjadikan Pilkades sekadar formalitas tanpa esensi kebebasan dan keadilan politik.²

Kedua, penelitian MA Sila berjudul “Kyai dan Blater: Antara Kesalehan dan Kekerasan” mencoba menelaah posisi dilematis tokoh agama (kyai) dalam lanskap kekerasan politik lokal. Rumusan masalah yaitu bagaimana relasi antara tokoh kiai dan blater dalam konteks politik lokal Madura, terutama bagaimana kesalehan dan kekerasan saling berjaln dalam dinamika politik lokal serta bagaimana praktik kekerasan yang dilakukan atau dikondisikan oleh elite lokal (kiai/blater) memengaruhi kualitas demokrasi dan kekuasaan di Madura. Teori yang diacu meliputi konsep patron-

² Ibid., 88-94.

klien lokal, konsep kekerasan simbolik dan struktur kekuasaan informal (termasuk ide-ide seperti yang dikembangkan oleh Johan Galtung tentang kekerasan langsung, struktural, dan kultural), serta antropologi politik lokal yang menyoroti nilai kehormatan (“ajhina” dalam budaya Madura) sebagai legitimator kekerasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Madura.³

Sementara, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kiai dan blater di Madura membentuk sistem kekuasaan ganda (rezim kembar) yang memadukan kesalehan religius dan kekerasan sebagai mekanisme dominasi politik. Kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga aktor politik yang memanfaatkan jaringan blater, tokoh lokal berpengaruh dengan kekuatan koersif, untuk mempertahankan dukungan massa dan pengaruh sosial. Sebaliknya, blater memperoleh legitimasi moral melalui kedekatannya dengan kiai, sehingga kekerasan yang dilakukan (intimidasi, ancaman, atau mobilisasi massa) sering dianggap sah secara budaya. Relasi ini melahirkan pola patronase dan loyalitas yang kuat dalam masyarakat, di mana kesalehan dijadikan pembenaran moral atas kekerasan politik. Akibatnya, kekuasaan informal berbasis kiai–blater mengikis nilai demokrasi di tingkat lokal karena proses politik berjalan dalam bayang-bayang tekanan sosial, patronase, dan kekerasan yang dilegitimasi secara kultural.⁴

Ketiga, penelitian A. Hannan berjudul “Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura” mengeksplorasi bagaimana agama menjadi

³ Sila, “Kiai Dan Blater: Antara Kesalehan Dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Lokal Di Madura.” *Studia Islamika*, 26(1), 185-200.

⁴ Ibid.

instrumen politik dalam mobilisasi massa menjelang pemilu. Rumusan masalah yaitu bagaimana dinamika kontestasi kepemimpinan lokal di Madura serta bagaimana dimensi keagamaan kiai dan sarana kekerasan kelompok blater memainkan peran sentral dalam perhelatan politik elektoral lokal Madura. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori genealogis kekuasaan dari Michel Foucault sebagai kerangka utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk kajian kepustakaan (library study) dengan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil-penelitian sebelumnya.⁵

Sementara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simbol keagamaan kiai dan kekuasaan blater berfungsi sebagai alat dominasi politik dalam konteks lokal Madura. Kiai menggunakan simbol dan otoritas keagamaan untuk membangun legitimasi moral serta memobilisasi dukungan sosial, sedangkan blater memainkan peran sebagai kekuatan informal yang mengontrol massa melalui tekanan sosial dan kekerasan. Kekerasan, dalam pandangan Hannan, bukan sekadar insiden politik, tetapi bagian dari mekanisme kekuasaan yang terstruktur, di mana intimidasi, mobilisasi, dan penggunaan simbol keagamaan menjadi strategi dalam perebutan pengaruh. Relasi antara kesalehan kiai dan kekuatan koersif blater membentuk sistem dominasi yang saling melengkapi, sehingga kontestasi politik di Madura tidak hanya berlangsung melalui jalur formal demokrasi, tetapi juga melalui jaringan patronase dan kekuasaan kultural yang menormalisasi kekerasan. Akibatnya, demokrasi lokal menjadi terdistorsi

⁵ Abd Hannan, "Agama, Kekerasan, Dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai Dan Kekuasaan Blater Dalam Pertarungan Politik Lokal Madura," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2 (2018): 187, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-02>.

oleh praktik dominasi simbolik dan kekerasan yang dilegitimasi secara sosial dan religius.⁶

Keempat, penelitian Amanah Nurish berjudul “Dari Fanatisme ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, dan Tindakan Kekerasan” meneliti proses perubahan fanatisme keagamaan menjadi ekstremisme yang melahirkan kekerasan di masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yaitu bagaimana sikap fanatisme keagamaan masyarakat Indonesia bermula dan berkembang serta melalui mekanisme apa fanatisme tersebut mengalami eskalasi menuju ekstremisme dan berujung pada kekerasan. Teori yang digunakan yaitu teori identitas sosial dan juga analisis budaya tentang ketidakamanan / kecemasan kolektif sebagai pemicu fanatisme. Selain itu teori mengenai media dan edukasi agama dipakai sebagai “gerbang” dimana fanatisme diekspos. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan karya observasi terhadap kenyataan sosial.⁷

Sementara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fanatisme keagamaan di Indonesia berakar dari dua faktor utama, yakni pendidikan keagamaan dan media, yang menjadi pintu masuk terbentuknya pola pikir eksklusif dan intoleran. Melalui pengajaran agama yang dogmatis serta penyebaran ujaran kebencian di media, individu dan kelompok mudah terpapar fanatisme yang kemudian berkembang menjadi ekstremisme. Fanatisme ini menimbulkan kecemasan kolektif dan rasa terancam yang mendorong tindakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan identitas dan legitimasi sosial. Kekerasan yang muncul bersifat fisik, simbolik, maupun struktural, menasar

⁶ Ibid.

⁷ Nurish, “*Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan.*” Jurnal Masyarakat Dan Budaya 21.1 (2019): 31-40.

kelompok minoritas atau pihak yang dianggap menyimpang dari norma. Nurish menegaskan bahwa ekstremisme bukan semata persoalan ideologis, tetapi juga terkait dengan struktur pendidikan, peran tokoh agama, serta konten media yang membiarkan fanatisme tumbuh tanpa kendali. Ia merekomendasikan penguatan literasi agama dan media, pembaruan kurikulum keagamaan, dan pengawasan terhadap ujaran kebencian sebagai langkah pencegahan kekerasan berbasis agama.⁸

Kelima, penelitian A. Fawaidi berjudul “Elections In Madura: Between Peaceful Traditions And Violent Practices.” mengangkat kontradiksi antara warisan budaya damai masyarakat Madura dengan praktik kekerasan dalam politik elektoral. Rumusan masalah yaitu apa saja bentuk-bentuk kekerasan elektoral yang muncul di Madura serta faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya kekerasan tersebut dalam konteks budaya lokal Madura. Teori yang digunakan yaitu Budaya patron-klien dan relasi kekuasaan informal di tingkat lokal, transformasi solidaritas tradisional keluarga/komunitas dan teori Ekonomi politik kemiskinan dan transaksi politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen sekunder.⁹

Sementara, hasil penelitian ini menemukan bahwa kekerasan elektoral di Madura muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti penyerangan massa dan pembakaran fasilitas publik, hingga kekerasan non-fisik seperti intimidasi, tekanan sosial, dan mobilisasi berbasis relasi patron-klien. Kekerasan ini dipicu oleh kombinasi faktor budaya dan struktural: peran dominan kiai dan blater dalam jaringan

⁸ Ibid.

⁹ Ach Fawaidi, “Elections In Madura: Between Peaceful Traditions And Violent Practices,” *Reflektika* 20, no. 1 (2025): 117–34.

patronase politik, transformasi nilai solidaritas taretan menjadi fanatisme partisan, serta kondisi ekonomi yang rentan yang mendorong praktik politik uang. Lemahnya penegakan hukum turut memperkuat siklus kekerasan karena pelaku merasa aman dari sanksi. Fawaidi menegaskan bahwa kekerasan tersebut tidak hanya merusak tatanan demokrasi prosedural, tetapi juga menodai nilai-nilai budaya Madura yang selama ini dianggap damai dan komunal. Ia merekomendasikan penguatan kelembagaan pemilu, peningkatan literasi politik berbasis kearifan lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat sebagai mediator untuk mengubah loyalitas komunal menjadi partisipasi politik yang lebih rasional dan damai.¹⁰

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kajian mengenai kekerasan politik di Madura khususnya di Kabupaten Sampang secara umum menempatkan kekerasan sebagai bagian dari dinamika kekuasaan lokal yang berkelindan dengan struktur sosial, budaya, dan religius masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan politik, baik dalam konteks Pilkadaes maupun kontestasi elektoral, tidak muncul secara spontan atau insidental, melainkan berakar pada relasi patronase, dominasi aktor informal seperti kiai dan blater, serta kuatnya nilai kehormatan (*ajhina*) yang dilegitimasi secara kultural dan religius. Kekuasaan informal ini menciptakan tekanan sosial, membatasi kebebasan politik warga, dan membuka ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam proses demokrasi lokal.

Secara tematik, penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian yang secara langsung menelaah kekerasan

¹⁰ Ibid.

politik dalam kontestasi lokal, seperti penelitian Istifarin dan Fawaidi, yang menguraikan bentuk, motif, serta dampak kekerasan elektoral dalam struktur sosial masyarakat Madura. Kedua, penelitian yang menyoroti peran aktor informal dan jaringan kekuasaan tradisional, seperti kajian MA Sila dan A. Hannan, yang menunjukkan bagaimana relasi kiai–blater membentuk sistem kekuasaan ganda dan melanggengkan praktik patronase serta kekerasan yang dilegitimasi secara moral dan budaya. Ketiga, studi yang menempatkan fanatisme dan identitas keagamaan sebagai faktor penting dalam eskalasi kekerasan, seperti penelitian Amanah Nurish, yang menjelaskan bagaimana fanatisme, kecemasan kolektif, dan legitimasi simbolik dapat mendorong tindakan kekerasan dalam masyarakat.

Dari sisi teori dan metode, kelima penelitian tersebut didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan penggunaan teori kekerasan struktural dan kultural, patronase klientelisme, relasi kuasa, serta politik identitas. Arah analisis cenderung menempatkan kekerasan sebagai fenomena sosial-budaya yang dilekatkan pada tradisi lokal dan struktur kekuasaan informal, dengan penekanan pada peran elite agama dan tokoh berpengaruh dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Meskipun memberikan gambaran yang kaya mengenai akar budaya dan historis kekerasan politik di Madura, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks Pilkades, dinamika kekuasaan tradisional, atau pembacaan kekerasan sebagai ekspresi kultural dan simbolik.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian, yakni belum adanya kajian yang secara spesifik mengkaji kekerasan politik elektoral kontemporer pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang dengan menempatkan

kekerasan sebagai hasil interaksi kompleks antara patronase keagamaan, jaringan blater, lemahnya kelembagaan demokrasi lokal, serta perkembangan ruang politik digital. Selain itu, kekerasan politik masih jarang dianalisis sebagai strategi politik yang terorganisir dan rasional dalam konteks kompetisi elektoral modern.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang pada Pemilu 2024 melalui pendekatan sosiologis dan politik yang saling melengkapi. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik dan digital yang dimediasi oleh relasi patronase sosial dan religius. Dengan menggunakan teori kekerasan politik Charles Tilly sebagai kerangka utama, serta didukung oleh teori konflik Lewis A. Coser dan teori patronase klientelisme James C. Scott, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kekerasan politik di Sampang telah menjadi pola sosial yang terlembagakan dan beradaptasi dalam konteks demokrasi elektoral kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar kekerasan politik lokal sekaligus menawarkan dasar analitis bagi upaya penguatan demokrasi yang lebih damai dan berkeadaban.

1. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori kekerasan politik yang dikembangkan oleh Charles Tilly sebagai teori utama, karena teori ini memberikan kerangka analitis paling komprehensif untuk membaca kekerasan politik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua teori pendukung, yaitu teori konflik Lewis A. Coser yang menjelaskan dinamika sosial-emosional dan fungsi konflik dalam memperkuat atau

mempertajam batas kelompok, serta teori patronase dan klientelisme politik dari James C. Scott yang membantu menafsirkan bagaimana relasi patron klien dan jaringan kekuasaan informal membentuk pola mobilisasi politik dan potensi kekerasan di tingkat lokal. Ketiga teori ini dipilih karena saling melengkapi dalam menjelaskan bentuk dan faktor pendorong kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang, sebuah wilayah yang ditandai oleh kuatnya ikatan sosial, patronase keagamaan, dan struktur kekuasaan informal.

a. Teori Kekerasan Politik

Teori kekerasan politik yang dikembangkan oleh Charles Tilly memandang kekerasan bukan sebagai perilaku menyimpang atau luapan emosi spontan, melainkan sebagai bagian dari proses politik yang rasional, terorganisir, dan berakar pada dinamika kekuasaan. Dalam *The Politics of Collective Violence*, Tilly menjelaskan bahwa kekerasan politik merupakan elemen dari *contentious politics*, yaitu kontestasi antara kelompok yang bersaing untuk memengaruhi, merebut, atau mempertahankan kekuasaan.¹¹ Dengan demikian, kekerasan tidak dianggap sebagai anomali, melainkan sebagai strategi yang digunakan aktor politik ketika saluran formal, seperti kompetisi elektoral atau institusi hukum, tidak bekerja secara efektif atau tidak memberikan keuntungan yang diharapkan.

Salah satu konsep utama Tilly adalah mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*). Menurut Tilly, kekerasan dapat muncul ketika kelompok penantang memiliki kemampuan untuk mengorganisasi massa, mengakses jaringan sosial, memobilisasi uang, senjata, atau kekuatan informal lainnya. Kekerasan menjadi pilihan

¹¹ Charles Tilly, *"The Politics of Collective Violence."* (Cambridge University Press, 2003), 40.

strategis ketika kapasitas mobilisasi ini memadai dan dapat diarahkan untuk menghantam lawan politik.¹² Dalam konteks Pemilu Sampang 2024, mobilisasi ini tampak melalui pengerahan massa berbasis jaringan blater, patron keagamaan, serta struktur sosial desa yang memungkinkan intimidasi terorganisir terhadap lawan politik maupun penyelenggara pemilu.

Tilly juga menekankan pentingnya struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*). Kekerasan politik meningkat ketika peluang untuk menggunakan kekerasan terbuka lebar, misalnya ketika negara melemah, aparat tidak netral, terjadi fragmentasi elite, atau ketika aturan formal tidak ditegakkan.¹³ Dalam kondisi seperti itu, aktor politik akan melihat kekerasan sebagai cara yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Fenomena Sampang 2024 sangat sesuai dengan pola ini, ketidaknetralan aparat lokal, kuatnya patronase keagamaan, serta lemahnya penegakan hukum membuat elite politik dan jaringan informal memanfaatkan situasi tersebut untuk mengamankan dukungan atau menekan lawan.

Konsep lain yang penting adalah repertoar aksi kolektif (*repertoire of collective action*). Tilly berpendapat bahwa masyarakat memiliki “repertoar” historis sekumpulan cara yang dianggap wajar, efektif, dan diterima secara budaya untuk mengekspresikan tuntutan politik. Repertoar ini dapat berupa demonstrasi, penghadangan, intimidasi, hingga kekerasan fisik.¹⁴ Dalam masyarakat Madura, khususnya Sampang, repertoar aksi kolektif ini dapat dilihat dalam bentuk ancaman carok, pengerahan massa desa, intimidasi simbolik, hingga kekerasan fisik seperti pembacokan saksi pada Pilkada

¹² Charles Tilly, *“From Mobilization to Revolution, in Collective Violence, Contentious Politics, and Social Change”* (Routledge, 2017), 71–91.

¹³ Ibid., 51.

¹⁴ Charles Tilly, *Regimes and Repertoires* (University of Chicago Press, 2010), 56.

2024. Artinya, kekerasan tidak hanya muncul karena situasi politik, tetapi juga karena tersedia secara historis sebagai cara legitim untuk mempertahankan kehormatan, loyalitas patron, dan kekuasaan.

Konsep framing dan legitimasi juga memiliki peran penting dalam teori Tilly. Kekerasan politik sering dilegitimasi melalui narasi moral atau simbolik sebagai upaya membela diri, menjaga kehormatan kelompok, atau melindungi patron. Dalam konteks Sampang, legitimasi ini diperkuat oleh simbol keagamaan, loyalitas kepada kiai, serta nilai budaya seperti harga diri (*ajhina*) yang membuat penggunaan kekerasan dianggap sah, terutama dalam kontestasi elektoral yang melibatkan patron besar. Kekerasan kemudian tidak hanya dilihat sebagai strategi politik, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki justifikasi moral dan sosial.

Secara keseluruhan, teori Tilly memberikan pemahaman bahwa kekerasan politik elektoral muncul melalui interaksi antara kapasitas mobilisasi, peluang politik yang terbuka, repertoar budaya, serta legitimasi simbolik yang melekat dalam struktur sosial masyarakat. Dalam kasus Sampang 2024, kekerasan tidak dapat dipandang sebagai insiden acak, tetapi sebagai manifestasi dari dinamika kekuasaan lokal yang terorganisir melalui patronase, jaringan informal, dan fragmentasi elite.

Dengan demikian, Teori Kekerasan Politik Charles Tilly memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menjelaskan bentuk kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang tahun 2024, serta faktor-faktor pendorong yang memungkinkannya terjadi khususnya kondisi sosial, budaya, dan politik yang menyediakan ruang bagi aktor politik untuk menggunakan kekerasan sebagai strategi dalam perebutan kekuasaan. Teori ini membantu melihat kekerasan sebagai fenomena

struktural dan instrumental, bukan sekadar luapan emosi massa, dan memberikan kerangka analisis yang tepat untuk membedah dinamika kekerasan elektoral dalam konteks politik lokal Sampang.

b. Teori Konflik

Teori konflik yang dikembangkan oleh Lewis A. Coser berangkat dari kritik terhadap pandangan fungsionalisme yang dianggap terlalu menekankan harmoni sosial. Dalam bukunya *The Functions of Social Conflict*, Coser menegaskan bahwa “*conflict is not only a disruptive force, but also a factor in the formation, persistence, and change of social structures*” Artinya, konflik tidak selalu membawa akibat negatif, tetapi dapat berfungsi memperkuat integrasi internal suatu kelompok, memperjelas norma, dan menyesuaikan struktur sosial dalam menghadapi ketegangan baru.¹⁵ Dengan perspektif ini, kekerasan politik elektoral bukan sekadar gangguan, melainkan bagian dari dinamika sosial yang mengungkap ketegangan kekuasaan di masyarakat.

Coser membedakan konflik menjadi dua bentuk, yakni konflik realistis dan konflik non realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berakar pada pertentangan kepentingan nyata, seperti perebutan jabatan, sumber daya politik, atau akses ekonomi. Konflik non realistis, menurut Coser, muncul sebagai ekspresi agresi atau emosi yang “*serves as a release for tension*”. Dalam konteks kekerasan elektoral di Sampang 2024, kedua bentuk konflik ini saling bercampur, kompetisi memperebutkan kekuasaan politik bupati (konflik realistis) diperparah oleh ekspresi kebencian antarkelompok dan fanatisme identitas (konflik non-realistis), yang tampak dalam ancaman carok, penyerangan terhadap saksi, dan hoaks pemilu.

¹⁵ Coser, Lewis A. “*The functions of social conflict*” (Vol. 9. Routledge, 1998), 65.

Salah satu konsep penting Coser adalah mengenai fungsi konflik dalam memperkuat batas kelompok (*group boundaries*). Ia menjelaskan bahwa “*external conflict increases internal cohesion*” konflik dengan pihak luar memperkuat loyalitas internal dan solidaritas kelompok.¹⁶ Hal ini sangat relevan dengan konteks Sampang, di mana jaringan patronase kiai dan blater memobilisasi massa melalui narasi “kami vs mereka”, sehingga konflik elektoral menjadi alat untuk memperkokoh loyalitas klien terhadap patron. Bentuk kekerasan seperti intimidasi, ancaman senjata tajam, hingga pembacokan saksi tidak hanya bertujuan menyerang lawan, tetapi juga memperkuat kohesi internal kelompok pendukung kandidat.

Coser juga menyatakan bahwa struktur internal kelompok menentukan bagaimana konflik dimanifestasikan. Dalam kelompok yang tertutup, hierarkis, dan sangat loyalistik, konflik internal ditekan dan dialihkan ke luar kelompok (*externalization of conflict*). Coser menulis bahwa kelompok seperti ini “*tends to direct its hostility outward rather than inward*”.¹⁷ Struktur sosial Sampang yang didominasi patronase keagamaan (kiai) dan kekuasaan informal blater sangat sesuai dengan karakteristik ini. Ketika terjadi ketegangan politik internal, ekspresi konfliknya sering kali diarahkan kepada aktor eksternal, seperti penyelenggara pemilu, pendukung lawan, atau warga yang berbeda pilihan politik.

Selanjutnya, teori Coser menekankan bahwa konflik menjadi destruktif ketika tidak dikelola melalui kanal formal atau ketika lembaga politik mengalami delegitimasi. Coser menjelaskan bahwa konflik dapat berfungsi positif “*only when there are institutional mechanisms that regulate it*”. Lemahnya penegakan hukum dan

¹⁶ Ibid., 80.

¹⁷ Coser, Lewis A. “*Continuities in the study of social conflict*.” (1967). 54-56.

rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat di Sampang menjadikan konflik elektoral keluar dari batas wajar dan berubah menjadi kekerasan terbuka. Kasus pembunuhan Jimmy Sugito Putra, ancaman carok, dan keributan akibat hoaks surat suara tercoblos menggambarkan bagaimana ketiadaan mekanisme kontrol menjerumuskan konflik elektoral menjadi kekerasan yang tidak terkendali.

Dalam kaitannya teori Coser membantu memetakan bentuk kekerasan politik elektoral di Sampang melalui klasifikasi konflik realistik dan non realistik, identifikasi sasaran kekerasan, dan fungsi sosial dari kekerasan tersebut. Teori ini membantu memahami apakah kekerasan muncul karena perebutan sumber daya politik, tekanan patronase, atau sebagai ekspresi emosional yang dilembagakan dalam budaya sosial politik Sampang.

Sementara disisi lain, teori Coser memberikan analisis mengenai faktor pendorong kekerasan, mulai dari ketimpangan patronase, ketegangan sosial, hingga struktur kekuasaan yang tertutup. Ketika patronase keagamaan dominan, hubungan klien-patron kuat, dan lembaga demokrasi lemah, konflik realistik mudah berubah menjadi kekerasan non-realistik yang bermuatan emosional.

Dengan demikian, teori konflik Lewis A. Coser memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan mengapa kekerasan elektoral di Sampang 2024 tidak hanya terjadi sebagai insiden sporadis, tetapi sebagai bentuk konflik sosial yang berfungsi memperkuat solidaritas kelompok, mempertahankan dominasi patron, dan mereproduksi struktur kekuasaan lokal.

c. Teori Patronase dan Klientelisme Politik

Teori patronase dan klientelisme politik yang diperkenalkan oleh James C. Scott menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan di masyarakat tradisional dan semi modern berlangsung melalui hubungan yang asimetris antara patron dan klien, bukan melalui sistem kontrak formal sebagaimana dalam politik modern. Dalam kerangka ini, patron merupakan pihak yang memiliki kekuasaan, status, dan sumber daya yang lebih besar, baik dalam bentuk ekonomi, politik, maupun sosial. Sementara klien adalah individu atau kelompok yang lebih lemah dan bergantung pada patron untuk memperoleh perlindungan, keuntungan ekonomi, atau dukungan sosial. Hubungan patron klien bersifat timbal balik tetapi tidak setara, patron memberikan manfaat atau perlindungan kepada klien, dan sebagai imbalannya klien memberikan loyalitas, dukungan politik, serta kepatuhan sosial.¹⁸

Scott menekankan bahwa hubungan patronase ini tidak bersifat impersonal seperti dalam sistem politik formal, melainkan berakar kuat pada hubungan sosial, kekerabatan, dan kedekatan emosional. Hubungan tersebut sering kali dipelihara melalui interaksi langsung atau tatap muka, sehingga menciptakan kedekatan simbolik antara patron dan klien. Dalam konteks politik elektoral, pola ini melahirkan sistem klientelisme politik, yaitu mekanisme pertukaran antara sumber daya ekonomi dengan dukungan politik. Patron memberikan uang, barang, atau fasilitas kepada masyarakat (klien), sedangkan masyarakat membalasnya dengan suara, dukungan massa, atau bahkan kesediaan untuk melakukan tindakan tertentu atas nama patronnya.

Karakteristik utama hubungan patronase menurut Scott meliputi beberapa aspek. Pertama, saling memberi keuntungan, di mana patron menyediakan

¹⁸ James C Scott, *“Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia,”* American Political Science Review 66, no. 1 (1972): 91–113.

perlindungan, bantuan, atau akses terhadap sumber daya publik, sementara klien memberikan dukungan politik dan kesetiaan pribadi. Kedua, berdasarkan hubungan sosial dan bukan kontrak formal, artinya hubungan ini didasari oleh norma kultural seperti rasa hormat, kesetiaan, dan utang budi (*reciprocal obligation*). Ketiga, ketidaksetaraan kekuasaan, di mana patron memiliki kontrol yang jauh lebih besar terhadap sumber daya dibanding klien, sehingga hubungan ini secara struktural menempatkan klien dalam posisi subordinat. Keempat, hubungan patronase biasanya melibatkan pertemuan tatap muka dan interaksi langsung, yang berfungsi memperkuat ikatan personal dan memastikan stabilitas jaringan sosial.¹⁹

Dalam konteks masyarakat seperti Madura dan khususnya Kabupaten Sampang, teori ini sangat relevan karena hubungan patronase dan klientelisme masih menjadi dasar utama dalam interaksi sosial politik. Kiai, blater, dan elite lokal berperan sebagai patron yang menyediakan perlindungan sosial, bantuan ekonomi, atau bahkan legitimasi religius bagi masyarakat. Sebagai balasannya, masyarakat menunjukkan kesetiaan politik melalui dukungan dalam Pemilu atau partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan yang diarahkan oleh patron. Hubungan ini menciptakan struktur ketergantungan yang kuat, di mana keputusan politik masyarakat sering kali bukan hasil pertimbangan rasional individual, tetapi bentuk kepatuhan terhadap patron yang dihormati.

Teori patronase dan klientelisme politik ini juga dapat menjelaskan mengapa kekerasan elektoral sering muncul di daerah dengan pola hubungan sosial semacam itu. Ketika dua patron berbeda bersaing dalam kontestasi politik, jaringan klien masing-

¹⁹ Ibid.

masing dapat termobilisasi untuk mempertahankan kehormatan dan dominasi patronnya. Loyalitas sosial dan ekonomi membuat klien rela terlibat dalam konflik, bahkan dalam bentuk kekerasan, demi membela simbol kehormatan patron.

Dengan demikian, teori ini memberikan landasan konseptual penting untuk memahami pola kekerasan politik elektoral di Sampang, di mana hubungan patron klien membentuk sistem kekuasaan informal yang sangat kuat. Patron berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial dan simbol moral, sementara klien menjadi instrumen mobilisasi politik dan sosial. Melalui pendekatan James C. Scott ini, kekerasan dapat dipahami bukan sebagai perilaku individual semata, melainkan sebagai hasil dari sistem relasi sosial yang terstruktur, di mana kekuasaan dan loyalitas saling memperkuat dalam satu jaringan patronal yang memelihara stabilitas sekaligus mempertahankan ketimpangan sosial politik di tingkat lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, khususnya fanatisme politik dan kekerasan elektoral yang terjadi di Sampang. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha menginterpretasikan makna yang berasal dari tindakan sosial, pandangan individu, serta konteks sosial yang melatarinya.¹ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga mengungkap makna dan dinamika yang melingkupi fenomena tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Robert Yin menegaskan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika peneliti ingin meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata dan ketika batas antara fenomena dengan konteks tidak sepenuhnya jelas.² Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk menggali detail secara intensif terhadap satu unit sosial tertentu. Dalam penelitian ini, unit kasus yang diteliti adalah fenomena fanatisme politik dan kekerasan elektoral dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang.

Pendekatan dan jenis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana fanatisme politik terbentuk, bagaimana ia bertransformasi menjadi kekerasan elektoral, serta bagaimana kerangka analisis digunakan untuk menilai dan memahami fenomena tersebut.

¹ J W Creswell and C N Poth, *"Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches"* (SAGE Publications, 2017), 89.

² Robert K Yin, *"Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)"*, 2014.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Sampang, Madura. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Pertama, Kabupaten Sampang menjadi locus terjadinya kasus tragis pada Pilkada 2024 yang menewaskan seorang pendukung calon bupati. Kedua, wilayah ini dikenal memiliki dinamika politik yang kompleks, dipengaruhi oleh patronase keagamaan, kultur blater, serta sejarah panjang konflik politik. Ketiga, hasil observasi awal dan kajian literatur menunjukkan bahwa Sampang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan konflik politik cukup tinggi, sehingga relevan dijadikan lokasi penelitian.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dimiliki.³

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tokoh agama atau kiai: figur berpengaruh yang mampu mengarahkan orientasi politik masyarakat melalui otoritas moral dan keagamaan.
- 2) Tim kampanye: perpanjangan tangan kandidat yang berperan membangun citra politik, menggalang dukungan, dan mengarahkan preferensi pemilih.
- 3) Relawan: pendukung sukarela yang membantu kandidat dalam menyebarkan informasi dan memperluas basis dukungan di masyarakat.

³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2023), 78.

- 4) Tokoh masyarakat: figur lokal berpengaruh yang menentukan arah politik warga melalui jaringan sosial dan kepercayaan publik.
- 5) Penyelenggara pemilu: pihak yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan.
- 6) Partai politik: organisasi politik yang menjadi wadah kompetisi, rekrutmen calon, dan representasi kepentingan politik masyarakat.
- 7) Masyarakat umum Desa Sampang: kelompok warga yang menjadi objek sekaligus saksi dampak sosial dari fanatisme politik dan kekerasan elektoral.

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan mengikuti prinsip sampai titik jenuh data (*data saturation*). Artinya, proses wawancara dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada temuan baru ⁴.

Tabel 2: Daftar Informan

NO	Nama Informan	Status Informan
1	Kiai Ahmad	Tokoh Agama
2	Jakfar Sodik	Tokoh Masyarakat
3	Aliyanto	Ketua KPU Sampang
4	Mushaddaq Chalili	Pengurus Partai PKB Sampang
5	Abd. Waffar	Relawan
6	Ali Wafa	Tim Kampanye
7	Khoiruddin	Masyarakat Umum Sampang
8	Humaidi	Masyarakat Umum Sampang
9	Irsyad	Masyarakat Umum Sampang

Sumber : Hasil Peneliti Saat Turun Lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai setting, dari beragam sumber, serta menggunakan beberapa metode. Creswell (2017)

⁴ M B Miles, dkk, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook" (SAGE Publications, 2018), 98.

menegaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan salah satu instrumen penting yang menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian⁵. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara dan dokumentasi.

1) Metode Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dan informan, baik dengan pedoman pertanyaan maupun secara semi-terbuka. Metode ini digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi subjektif informan mengenai bentuk dan faktor pendorong kekerasan politik elektoral di Sampang tahun 2024.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara in-depth interview terhadap informan yang dipilih secara purposif, sehingga untuk memastikan wawancara berjalan sistematis, lengkap, dan menghasilkan data yang akurat, penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu, yaitu:

- Panduan Wawancara (Interview Guide)

Digunakan untuk mengarahkan alur pertanyaan agar sesuai dengan fokus penelitian, seperti bentuk kekerasan, aktor yang terlibat, dan dampaknya. Panduan ini memastikan konsistensi antar wawancara sehingga data dapat dibandingkan.

- Perekam Suara / Voice Recorder (ponsel atau perangkat khusus)

Berfungsi sebagai bukti bahwa wawancara benar-benar dilakukan. Rekaman membantu menangkap detail percakapan, intonasi, dan pernyataan penting yang mungkin terlewat dalam pencatatan manual.

⁵ Creswell and Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

- Kamera / Ponsel (Foto dan Video Dokumentasi)

Digunakan untuk mendokumentasikan situasi wawancara, lingkungan lokasi, atau bukti fisik terkait peristiwa (misalnya: kondisi TPS, lokasi kejadian kekerasan). Dokumentasi visual mendukung validitas penelitian dan memudahkan analisis konteks.

- Buku Catatan Lapangan

Berfungsi mencatat kesan, observasi non-verbal, perilaku informan, suasana wawancara, dan konteks sosial selama proses berlangsung. Catatan lapangan penting untuk interpretasi data.

- Alat Tulis (Pulpen, Stabilo, Penanda)

Digunakan untuk menandai poin penting, membuat sketsa lokasi, mencatat kutipan langsung, serta mengorganisir temuan wawancara.

Penggunaan alat-alat tersebut memastikan bahwa proses wawancara bersifat transparan, terstruktur, dan mampu menghasilkan data yang kuat sesuai kebutuhan penelitian.

2) Metode Dokumentasi sebagai sumber data primer

Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Dokumentasi dipahami sebagai penelusuran terhadap berbagai catatan tertulis, arsip resmi, serta dokumen publik yang relevan dengan dinamika kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang. Dokumen yang dikumpulkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tambahan, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi terhadap temuan lapangan, khususnya dalam

mengidentifikasi bentuk kekerasan, aktor yang terlibat, serta pola penanganan konflik oleh lembaga berwenang.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, dokumen resmi pemerintah dan penyelenggara pemilu yang mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait tahapan dan pengawasan Pemilu 2024, laporan tahapan pemilu mulai dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara, serta laporan pelanggaran dan sengketa pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sampang. Dokumen ini digunakan untuk memahami kerangka hukum, prosedur formal, serta bentuk pelanggaran yang secara administratif tercatat selama proses pemilu.

Kedua, dokumen yang bersumber dari aparat keamanan dan pemerintah daerah, seperti laporan Polres Sampang mengenai konflik, intimidasi, dan kekerasan selama tahapan Pemilu 2024, data kamtibmas, serta laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait stabilitas politik lokal. Dokumen ini dimanfaatkan untuk memetakan tingkat kerawanan keamanan, pola eskalasi konflik, serta bentuk respons aparat terhadap kekerasan politik elektoral di lapangan.

Ketiga, dokumentasi dari media massa dan publikasi publik, yang meliputi kliping berita media lokal dan nasional mengenai bentrok antarpending, intimidasi politik, politik uang, serta pelanggaran kampanye. Selain itu, peneliti juga menggunakan publikasi resmi dari Bawaslu RI, KPU RI, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang membahas kerawanan pemilu di wilayah Madura.

Sumber ini digunakan untuk menangkap representasi publik atas peristiwa kekerasan elektoral serta membandingkan temuan lapangan dengan narasi media.

Keempat, dokumen statistik dan data sosial-politik, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang mengenai demografi, tingkat pendidikan, kemiskinan, dan mata pencaharian, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dari Bawaslu, data partisipasi pemilih dan tingkat golput dari KPU Kabupaten Sampang, serta hasil survei politik dari lembaga survei nasional. Data ini digunakan untuk menganalisis faktor struktural dan sosial-ekonomi yang mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap kekerasan politik elektoral.

Kelima, dokumen akademik dan penelitian terdahulu yang meliputi tesis, disertasi, jurnal ilmiah, yang membahas kekerasan politik, patronase, konflik lokal, dan politik Madura. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan komparatif dan penguat analisis teoritis dalam membaca fenomena kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang.

Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen tambahan yang mendukung analisis lapangan, seperti peta daerah pemilihan dan peta TPS rawan konflik, foto dan vkejadian kekerasan politik, serta transkrip wawancara dan notulensi rapat dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Keseluruhan dokumentasi tersebut digunakan secara selektif dan kritis untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam bab hasil penelitian memiliki keterkaitan langsung dengan sumber yang disebutkan dalam metode penelitian, sehingga menjaga konsistensi, validitas, dan akuntabilitas penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan cara mengumpulkan, memilah, menemukan pola (*finding a pattern*), menentukan apa yang penting, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan sementara (*tentative conclusion*).⁶ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu mengolah data-data yang telah terkumpul dengan menganalisisnya sesuai kondisi lapangan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a) Kondensasi Data

Kondensasi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan agar tetap relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dikategorikan secara sistematis. Dalam penelitian ini, kondensasi diarahkan untuk menyaring informasi yang berhubungan dengan fenomena fanatisme politik, bentuk kekerasan elektoral, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan, serta pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik politik yang berkembang di tengah masyarakat. Proses kondensasi ini membantu peneliti untuk lebih mudah memahami data yang terkumpul, menyingkirkan informasi yang tidak relevan, dan menjaga agar analisis tetap fokus pada tema utama, yaitu fanatisme politik dan kekerasan elektoral dalam konteks Pemilu di Sampang.

b) Data Display / Penyajian Data

⁶ Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Data display adalah proses penyajian data yang sudah mengalami reduksi, sehingga dapat dipahami lebih mudah. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk uraian naratif, matriks, tabel, maupun diagram tematik. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori seperti fanatisme politik, intimidasi dan kekerasan elektoral, serta peran patronase agama dan kiai. Penyajian ini mempermudah peneliti memahami hubungan antar data, serta menyusun analisis yang utuh mengenai fenomena kekerasan elektoral di Sampang.

c) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan bersifat sementara pada awalnya, kemudian diverifikasi dengan data tambahan atau hasil triangulasi. Kesimpulan akhir didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, yakni bagaimana fanatisme politik di Sampang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan elektoral, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kritik dan solusi terhadap fenomena tersebut.

B. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Seluruh data yang diperoleh dari lapangan setelah dipilah kemudian diorganisir untuk menemukan pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul hingga akhirnya mengerucut pada kesimpulan. Agar kesimpulan penelitian lebih kuat, diperlukan proses verifikasi ulang, baik dengan menambahkan data baru maupun membandingkannya dengan informasi pendukung lainnya, sehingga hasil akhir dapat

dipastikan valid. Pada tahap ini, kajian literatur juga berperan penting sebagai penguat dalam menguji temuan lapangan melalui teknik triangulasi.

Triangulasi dalam konteks pengujian kredibilitas dipahami sebagai upaya mengecek keabsahan data melalui berbagai sumber, teknik, maupun waktu yang berbeda. Bentuk triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data dari beberapa informan, triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa informasi yang sama menggunakan metode berbeda, sementara triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data melalui wawancara, observasi, atau metode lain pada waktu dan situasi yang berbeda. Sugiyono (2023) menegaskan bahwa triangulasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian yang ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni dengan cara menguji data dari berbagai informan yang relevan, serta melakukan observasi dan dokumentasi dari sumber-sumber yang berbeda.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Pilkada Kabupaten Sampang 2024

1. Tahapan Pilkada Kabupaten Sampang 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada Serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Penyelenggaraan Pilkada ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.³⁷

Berdasarkan regulasi tersebut, tahapan Pilkada Kabupaten Sampang dimulai sejak 26 Januari 2024 dengan kegiatan perencanaan program dan anggaran. Tahapan-tahapan utama yang dilaksanakan meliputi:

1.1 Tahap Persiapan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum. Tahapan tersebut diawali dengan persiapan sebagai fondasi administratif dan teknis penyelenggaraan Pilkada. Selanjutnya, KPU menyusun berbagai peraturan penyelenggaraan pemilihan yang menjadi pedoman operasional selama seluruh proses Pilkada berlangsung. Dalam rangka menjamin kesiapan penyelenggaraan di tingkat lokal, dilakukan pembentukan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan

³⁷ KPU, "Portal Pemilihan Pilkada 2024," *Info Pemilu KPU Republik Indonesia* (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024), <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>.

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, KPU juga membuka ruang partisipasi publik melalui pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Tahapan lainnya meliputi penyerahan daftar penduduk potensial pemilih serta proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih. Keseluruhan tahapan ini menjadi kerangka dasar penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang 2024 yang menentukan kualitas dan legitimasi proses demokrasi lokal.³⁸

Tabel 3: Tahapan Persiapan Pilkada

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Perencanaan program dan anggaran	26 Januari 2024
2	Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan	18 November 2024
3	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April - 5 November 2024
4	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan	27 Februari -16 November 2024
5	Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih	24 April - 31 Mei 2024
6	Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	31 Mei - 23 September 2024

Sumber : KPU RI

1.2 Tahap Pencalonan

Tahapan pencalonan diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan ini meliputi:

Tabel 4: Tahapan Pencalonan Pilkada

No.	Tahapan Pencalonan	Waktu Pelaksanaan
1	Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan	5 Mei – 19 Agustus 2024
2	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	24 – 26 Agustus 2024
3	Pendaftaran pasangan calon	27 – 29 Agustus 2024

³⁸ KPU.

4	Penelitian persyaratan administrasi calon	27 Agustus – 21 September 2024
5	Penetapan pasangan calon	22 September 2024
6	Pengundian nomor urut pasangan calon	23 September 2024

Sumber : KPU RI

KPU Kabupaten Sampang melaksanakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 737.832 pemilih pada 20 September 2024. Selanjutnya, pengundian nomor urut dilaksanakan pada 23 September 2024 di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Jalan Trunojoyo Sampang.³⁹

1.3 Tahap Kampanye

Tahap kampanye dalam Pilkada Kabupaten Sampang 2024 dilaksanakan sejak bulan September hingga November 2024, dimulai setelah penetapan pasangan calon dan berakhir pada masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Pada tahap ini, pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan kampanye yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh aktivitas kampanye dilaksanakan di bawah pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan proses kampanye berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

1.4 Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari rangkaian Pilkada Kabupaten Sampang 2024 dan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Tahapan ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pemungutan

³⁹ KPU Sampang, “Publikasi KPU Kabupaten Sampang” (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, 2024), <https://kab-sampang.kpu.go.id/>.

⁴⁰ Sampang.

suara dilaksanakan di 1.344 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 180 desa dan 6 kelurahan pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan pengawasan dari Bawaslu guna menjamin pelaksanaan Pilkada berjalan secara jujur dan adil.⁴¹

1.5 Tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Sampang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 dan bertempat di Gedung GOR Indoor Sampang. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses penetapan hasil Pilkada karena merupakan forum resmi penghitungan dan penegasan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menetapkan pasangan calon terpilih pada tanggal 6 Februari 2025 sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Sampang 2024. Setelah penetapan tersebut, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, yang menandai dimulainya masa jabatan pemerintahan daerah hasil Pilkada Kabupaten Sampang 2024.⁴²

2. Peserta Pilkada: Pasangan Calon dan Partai Pengusung

Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024 diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi serta memperoleh dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengundian nomor urut yang dilaksanakan pada tanggal 23

⁴¹ Sampang.

⁴² Sampang.

September 2024, salah satu pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu KH. Muhammad Bin Muafi Zaini dan H. Abdullah Hidayat, yang dikenal dengan nama pasangan MANDAT.

KH. Muhammad Bin Muafi Zaini yang akrab disapa Ra Mamak, Kiai Mamak, atau Gus Mamak, maju sebagai calon Bupati Kabupaten Sampang. Sementara itu, posisi calon Wakil Bupati diisi oleh H. Abdullah Hidayat yang dikenal dengan panggilan Mas AB. Pasangan calon nomor urut 1 ini memperoleh dukungan politik dari koalisi delapan partai politik, yang menjadi basis kekuatan politik mereka dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sampang 2024.

Tabel 5: Partai Politik Pengusung Mandat

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Golongan Karya (Golkar)
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
5	Partai Demokrat
6	Partai Bulan Bintang (PBB)
7	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Sumber : KPU Sampang

Dari sisi dukungan politik, pasangan calon MANDAT didukung oleh koalisi delapan partai politik. Koalisi partai pengusung tersebut memiliki kekuatan yang cukup signifikan di lembaga legislatif daerah, dengan menguasai 18 kursi dari total 45 kursi DPRD Kabupaten Sampang berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024. Kekuatan kursi ini menjadi modal politik penting bagi pasangan MANDAT dalam kontestasi

Pilkada, baik dalam memenuhi ambang batas pencalonan maupun dalam mengonsolidasikan dukungan politik di tingkat lokal.⁴³

KH Muhammad Bin Muafi Zaini merupakan tokoh kiai dengan latar belakang pesantren dari Ponpes Nahzatut Thulab Desa Prajjan Kecamatan Camplong. Sementara H. Abdullah Hidayat merupakan Wakil Bupati Sampang periode 2019-2024 yang berpasangan dengan H. Slamet Junaidi, namun kemudian memutuskan untuk maju dengan pasangan berbeda pada Pilkada 2024.

Selain pasangan calon nomor urut 1, Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024 juga diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Slamet Junaidi dan KH. Ahmad Mahfud, yang dikenal dengan nama pasangan JIMAD SAKTEH. Pasangan ini ditetapkan sebagai peserta Pilkada setelah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Slamet Junaidi, yang akrab disapa Ba Idi atau Aba Idi, maju sebagai calon Bupati Kabupaten Sampang. Ia merupakan Bupati Sampang periode 2019–2024, sehingga pencalonannya dalam Pilkada 2024 mencerminkan upaya petahana untuk mempertahankan kepemimpinan di daerah tersebut. Sementara itu, posisi calon Wakil Bupati diisi oleh KH. Ahmad Mahfud, yang dikenal dengan panggilan Ra Mahfud. Kombinasi pasangan ini merepresentasikan perpaduan antara pengalaman kepemimpinan pemerintahan dan figur religius yang memiliki pengaruh sosial di masyarakat.

Dari sisi dukungan politik, pasangan calon JIMAD SAKTEH didukung oleh koalisi enam partai politik, yang terdiri dari empat partai parlemen dan dua partai non-

⁴³ Sampang.

parlemen. Koalisi partai pengusung tersebut menguasai sekitar 15 kursi dari total 45 kursi DPRD Kabupaten Sampang berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024, atau sekitar sepertiga dari total kursi DPRD. Kekuatan kursi ini menjadi modal politik yang cukup signifikan bagi pasangan JIMAD SAKTEH dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sampang 2024.

Tabel 6: Partai Politik Pengusung Jimat

No	Nama Partai	Keterangan
1	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	Parlemen
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Parlemen
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Parlemen
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Parlemen
5	Partai Garuda	Non-parlemen
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	Non-parlemen

Sumber : KPU Sampang

Menariknya, kontestasi Pilkada Sampang 2024 juga diwarnai oleh fenomena pecah kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati petahana periode sebelumnya. H. Slamet Junaidi yang pada periode 2019–2024 berpasangan dengan H. Abdullah Hidayat, pada Pilkada 2024 memilih untuk maju kembali dengan pasangan yang berbeda. Dinamika politik ini menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian publik dan berpotensi memengaruhi preferensi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sampang 2024.

Secara regulatif, pencalonan pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Sampang 2024 mengacu pada ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan turunannya. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, terdapat 11 partai politik yang memperoleh kursi dengan total 45 kursi DPRD Kabupaten Sampang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati apabila memenuhi ambang batas 20% dari jumlah kursi DPRD, yaitu minimal 9 kursi, atau 25% dari total suara sah.

Namun demikian, ketentuan tersebut mengalami penyesuaian pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang kemudian diakomodasi dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Putusan ini membuka ruang bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, dengan syarat memenuhi ambang batas perolehan suara yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Untuk Kabupaten Sampang, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 737.832 pemilih dan termasuk dalam kategori kabupaten dengan jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2024 harus memperoleh sedikitnya 7,5% suara sah di Kabupaten Sampang agar dapat mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

3. Jumlah Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Jumlah pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 737.832 pemilih. Jumlah ini mencerminkan seluruh warga Kabupaten Sampang yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030.

Untuk melayani seluruh pemilih yang terdaftar, KPU Kabupaten Sampang menyediakan sebanyak 1.344 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 180

desa dan 6 kelurahan pada 14 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Dengan proyeksi sekitar 600 pemilih di setiap TPS, jumlah tersebut dinilai telah memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Jumlah TPS ini mengalami pengurangan dibandingkan proyeksi awal yang mencapai sekitar 1.800 TPS dengan asumsi 450 pemilih per TPS. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan.

Pada pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada 27 November 2024, partisipasi pemilih di Kabupaten Sampang tergolong cukup tinggi. Dari total 737.832 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 645.722 pemilih tercatat menggunakan hak pilihnya di TPS. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih mencapai 85,5 persen. Dari total suara yang masuk, sebanyak 633.087 suara dinyatakan sah, sementara 12.635 suara dinyatakan tidak sah.

Meskipun tingkat partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan oleh KPU Kabupaten Sampang, capaian ini tetap menunjukkan adanya antusiasme dan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sampang dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024.

4. Penyelenggara Pemilihan

4.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang periode 2024–2029 merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Kabupaten Sampang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang Tahun 2024 secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan komisioner KPU Kabupaten Sampang periode 2024–2029 terdiri atas lima orang anggota yang masing-masing membidangi divisi tertentu guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemilihan. Adapun susunan komisioner KPU Kabupaten Sampang periode 2024–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Susunan Komisioner KPU Kabupaten Sampang

Jabatan	Nama	Divisi
Ketua	Aliyanto, S.H.	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
Anggota	Siti Aisah, S.I.Kom	Hukum dan Pengawasan
Anggota	Karimullah, S.Sos	Perencanaan Data dan Informasi
Anggota	Suhariyanto, S.Sos	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
Anggota	Fadli, S.E.Sy	Teknis Penyelenggaraan

Sumber : KPU Sampang

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga proses rekapitulasi serta penetapan hasil pemilihan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) guna menjamin kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Sampang (Radar Madura, 2025).

4.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang periode 2023–2028 merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pengawasan tersebut dilaksanakan guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Susunan komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang periode 2023–2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Susunan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang

Jabatan	Nama
Ketua	Muhalli, M.H.
Anggota	Purnidi Sutrisno, S.E.
Anggota	Mat Sodik, S.E.
Anggota	Morsidi Ali Syahbana, S.Pd.
Anggota	Moh. Ramli, S.Pd.I.

Sumber : Bawaslu Sampang

Dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan, Bawaslu Kabupaten Sampang didukung oleh jajaran pengawas pemilu ad hoc yang tersebar hingga tingkat tempat pemungutan suara. Adapun struktur pengawas pemilu ad hoc tersebut meliputi:

- Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam): sebanyak 42 orang yang bertugas di 14 kecamatan;
- Pengawas Kelurahan/Desa (PKD): sebanyak 186 orang yang tersebar di 180 desa dan 6 kelurahan;
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS): sebanyak 1.344 orang yang ditempatkan di seluruh TPS.

Secara keseluruhan, terdapat 1.572 pengawas pemilu yang terlibat dalam proses pengawasan Pilkada di Kabupaten Sampang. Keberadaan jajaran pengawas ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan secara menyeluruh, sehingga setiap

tahapan Pilkada dapat berlangsung secara transparan, berintegritas, serta sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

5. Hasil Pemilihan dan Penetapan Pemenang

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang pada 6 Desember 2024 pukul 00.34 WIB bertempat di Gedung GOR Indoor Sampang, diperoleh hasil perolehan suara dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang sebagai berikut (KPU Kabupaten Sampang, 2024):

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (MANDAT):

KH. Muhammad Bin Muafi Zaini – H. Abdullah Hidayat

Perolehan suara sebanyak 294.605 suara, atau setara dengan 46,5% dari total suara sah.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (JIMAD SAKTEH):

H. Slamet Junaidi – KH. Ahmad Mahfud

Perolehan suara sebanyak 338.482 suara, atau setara dengan 53,5% dari total suara sah.

Berdasarkan hasil tersebut, pasangan calon nomor urut 2, yaitu H. Slamet Junaidi KH. Ahmad Mahfud, ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024, dengan keunggulan 43.877 suara dibandingkan pasangan calon nomor urut 1 (RRI, 2024).

6. Konteks Sosial Politik Pilkada Kabupaten Sampang 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang tahun 2024 yang berlangsung pada 27 November 2024 dilaksanakan dalam situasi kerawanan sosial-

politik yang tinggi. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, Kabupaten Sampang memperoleh skor 52,19 dan masuk kategori daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya pada dimensi penyelenggaraan pemilu, konteks sosial-politik, kontestasi, dan partisipasi politik.⁴⁴ Kondisi ini tidak terlepas dari sejarah panjang konflik elektoral yang berulang sejak 2014 hingga 2024, mulai dari intimidasi, kerusuhan TPS, politik uang, hingga kekerasan fisik.

Tabel 9: Tingkat Kerawanan Pemilu 2024

Provinsi	Kabupaten/Kota	Skor IKP 2024	Kategori IKP
Jawa Timur	Kota Surabaya	40,16379929	Sedang
Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso	40,41949844	Sedang
Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	48,0902977	Sedang
Jawa Timur	Kabupaten Sampang	52,19499969	Tinggi
Jawa Timur	Kabupaten Malang	64,00789642	Tinggi
Jawa Timur	Kabupaten Tuban	56,207798	Tinggi
Jawa Timur	Kabupaten Kediri	63,40019989	Tinggi

Sumber : (Bawaslu RI, 2024)

Kerawanan tersebut diperkuat oleh fanatisme politik yang tinggi, keterlibatan aktor informal, serta kuatnya budaya patronase berbasis identitas sosial dan keagamaan. Polarisasi masyarakat tidak hanya bersifat politik, tetapi juga terkait dengan loyalitas terhadap tokoh, pesantren, dan jaringan kekerabatan, sehingga konflik yang muncul cenderung bersifat komunal. Praktik intimidasi non-verbal, termasuk penggunaan simbol kekerasan tradisional seperti celurit, turut membatasi kebebasan politik warga.

Puncak eskalasi kekerasan terjadi pada 17 November 2024 dengan meninggalnya Jimmy Sugito Putra akibat pengeroyokan dalam konflik antarpendukung calon bupati,

⁴⁴ Bawaslu, "Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan 2024 Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia," 2024.

yang dipicu ketegangan kunjungan politik antarjaringan pesantren.⁴⁵ Selain itu, Pilkada Sampang 2024 juga diwarnai hoaks, ancaman terhadap penyelenggara pemilu, dan kericuhan akibat persoalan data pemilih. Meskipun telah dilakukan patroli dan koordinasi oleh aparat keamanan dan Forkopimda, kekerasan politik elektoral di Sampang menunjukkan persoalan struktural yang berakar pada dominasi aktor informal dan lemahnya institusionalisasi nilai demokrasi substantif.

B. Bentuk Kekerasan Politik Elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sampang diselenggarakan dalam kerangka tahapan yang telah ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Secara umum, tahapan Pilkada tersebut dimulai dari pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan pada 27 Februari 2024 dan berakhir pada penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pada 16 Desember 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota/Wakilnya. Dalam rentang waktu pelaksanaan tahapan tersebut telah terjadi setidaknya enam insiden kekerasan politik elektoral yang signifikan, yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang tegang di Kabupaten Sampang.

Tabel 9: Insiden Kekerasan Politik di Sampang

No	Tahun	Kasus / Peristiwa	Lokasi & Kronologi Singkat
1	2024	Hoaks Surat Suara Tercoblos (Pemilu Presiden)	Gunung Kesan, warga marah → kekerasan verbal

⁴⁵ Rahman, "Kronologi Lengkap Pembacokan Hingga Tewas Saksi Cabup Sampang."

2	2024	Pembacokan Saksi Paslon (17 Nov)	Ketapang Laok, saksi dikeroyok & meninggal
3	2024	Keributan TPS Tanggumong	Adu mulut warga-KPPS, satu warga pingsan
4	2024	Pria Bercelurit Ancam Carok (Robatal)	Ancaman kepada petugas karena undangan
5	2024	Provokasi Lewat Rekaman Suara	Pesan ajak “siapkan senjata”
6	2024	Video Penganiayaan Viral	Rekaman penganiayaan beredar luas

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel tersebut selama Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang, terjadi berbagai bentuk kekerasan politik elektoral yang mencerminkan tingginya ketegangan sosial-politik, mulai dari kekerasan verbal dan fisik, intimidasi, hingga provokasi yang memperkuat polarisasi masyarakat. Insiden paling menonjol adalah pembacokan terhadap seorang saksi pasangan calon bupati di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, pada 17 November 2024, yang bermula dari konflik antarkelompok saat kunjungan politik ke rumah tokoh agama dan berujung pada pengeroyokan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Gambar 1 : Korban Terjatuh setelah dibacok



Sumber : tribunjatim.com

Dari rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang, penelitian ini menemukan adanya berbagai bentuk kekerasan politik elektoral yang berlangsung secara berlapis dan saling berkaitan. Berdasarkan temuan di lapangan, bentuk-bentuk kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang meliputi kekerasan non-fisik dan intimidasi sosial, kekerasan simbolik berbasis budaya lokal, kekerasan struktural melalui relasi patronase politik, kekerasan verbal yang memperkuat polarisasi sosial, kekerasan digital melalui penyebaran hoaks dan provokasi, serta kekerasan fisik sebagai bentuk eskalasi konflik terbuka.

Pertama, kekerasan non fisik dan intimidasi sosial, kekerasan non fisik menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan selama Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang. Intimidasi sosial dan tekanan psikologis terhadap pemilih terjadi melalui mekanisme sosial yang halus, namun berdampak luas terhadap kebebasan politik warga. Banyak masyarakat yang merasa tidak sepenuhnya bebas dalam mengekspresikan pilihan politiknya karena adanya tekanan dari lingkungan sosial dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal. Seorang tokoh agama Kiai Ahmad menjelaskan:

“Tekanan itu tidak pernah keras atau memaksa biasanya seorang kiai itu mas hanya memberi gambaran saja tentang pasangan calon, tapi jamaah sudah merasa sendiri. Kalau berbeda pilihan, rasanya tidak enak sebagai murid mas. Kalau saya tidak pernah memaksa para jamaah atau murid untuk memilih salah

*satu paslon mas. Tapi ya ada juga mas kiai-kiai dilain desa ada yang mengarahkan pilihan mas”*⁴⁶

Tekanan serupa juga dirasakan oleh masyarakat umum, terutama menjelang hari pemungutan suara. Seorang warga bernama Khoiruddin menyatakan:

“Aslinah adhe se maksa langsung mas, tapeh kebanyakan an masyarakat jiah la paham koduk nurok sapah, soallah mon e katelak bideh pelean pas deddi rasan mas”

*“Tidak ada yang memaksa langsung, tapi sudah paham sendiri harus ikut siapa. Kalau kelihatan beda, bisa jadi omongan.”*⁴⁷

Selain tekanan sosial berbasis relasi dan pengaruh tokoh, kekerasan non fisik juga muncul melalui persoalan teknis penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada kondisi psikologis pemilih. Salah satu temuan peneliti menunjukkan adanya dinamika terkait distribusi formulir C6 (surat undangan memilih) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang. Sebagian masyarakat dilaporkan belum menerima formulir C6 menjelang hari pemungutan suara, sehingga menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan rasa takut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Meskipun penyelenggara pemilu menyatakan bahwa pemilih tetap dapat mencoblos dengan menunjukkan identitas diri, informasi tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di tingkat bawah, sehingga membuka ruang spekulasi, kecurigaan, dan tekanan sosial antarwarga.⁴⁸

Gambar 2 : Suasana saat Permasalahan C6

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kiai Ahmad Tokoh Agama pada Tanggal 13 Desember 2025

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Khoiruddin Warga Sampang pada Tanggal 14 Desember 2025

⁴⁸ Alfin Nuary, “Permasalahan C6 Masih Jadi Dinamika Di Pilkada Sampang,” n.d., <https://rri.co.id/sampang/pilkada-2024/1149721/permasalahan-c6-masih-jadi-dinamika-di-pilkada-sampang>.



Sumber : rri.co.id

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan administratif pemilu dapat bertransformasi menjadi bentuk kekerasan non-fisik ketika informasi tidak tersampaikan secara merata dan transparan. Dalam konteks sosial Kabupaten Sampang yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap arahan tokoh dan aparat lokal, ketidakjelasan terkait hak memilih justru memperkuat tekanan psikologis dan membatasi kebebasan politik warga secara tidak langsung.

Selain dialami oleh pemilih, intimidasi non-fisik juga dirasakan oleh relawan dan tim kampanye, khususnya ketika melakukan aktivitas di wilayah yang telah dikuasai oleh jaringan politik tertentu. Seorang relawan Abd. Waffar menuturkan:

“Kami pernah ditegur supaya jangan kampanye di daerah situ. Tidak diancam, tapi maksudnya jelas.” ⁴⁹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi massa dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang sangat bergantung pada jaringan patron yang dipimpin oleh kiai dan blater. Sebagaimana dinyatakan oleh Tilly, mobilisasi massa merupakan proses pengorganisasian kelompok melalui jaringan sosial yang telah ada untuk mencapai

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan relawan Abd. Waffar pada Tanggal 15 Desember 2025

tujuan politik kolektif. Dalam konteks Sampang, kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai *political broker* yang mampu mengarahkan pilihan politik jamaah dan masyarakat luas.

Pernyataan informan Kiai Ahmad yang menyatakan bahwa "*jamaah sudah merasa sendiri*" ketika kiai memberikan gambaran tentang pasangan calon menunjukkan adanya mekanisme mobilisasi yang halus namun efektif. Hal ini sejalan dengan konsep Tilly mengenai *contentious politics*, di mana mobilisasi tidak selalu bersifat koersif secara eksplisit, tetapi dapat berlangsung melalui tekanan sosial dan moral yang terinternalisasi dalam struktur komunitas.⁵⁰ Masyarakat merasa berkewajiban mengikuti arahan kiai bukan karena paksaan langsung, tetapi karena ikatan moral dan rasa hormat yang telah terbangun dalam relasi patron-klien jangka panjang.

Selanjutnya, temuan penelitian mengenai kehadiran blater di sekitar TPS dan wilayah kampanye mencerminkan fungsi mereka sebagai enforcement mechanism dalam jaringan patronase. Blater, sebagai tokoh informal dengan reputasi sosial tertentu, berperan dalam memastikan loyalitas massa terhadap patron politik. Kehadiran mereka menciptakan "kekerasan simbolik" yang, menurut Bourdieu, bekerja melalui mekanisme psikologis tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik secara langsung.⁵¹ Masyarakat merasa "diawasi" dan "ditekan" untuk mengikuti pilihan politik tertentu, sebagaimana diungkapkan oleh informan yang menyatakan bahwa "cukup dengan hadir saja sudah ada tekanan."

⁵⁰ Charles Tilly and Sidney G Tarrow, *Contentious Politics* (Oxford University Press, 2015).

⁵¹ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Harvard university press, 1991).

Pola mobilisasi massa ini juga diperkuat oleh temuan survei ELSIPOL yang menunjukkan bahwa tingkat kesukaan terhadap figur calon mencapai lebih dari 90 persen dan pengaruh tokoh masyarakat menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Hal ini mengonfirmasi argumen Tilly bahwa mobilisasi massa dalam konteks kekerasan politik sangat bergantung pada jaringan sosial yang sudah mapan, di mana loyalitas kepada patron melampaui pertimbangan rasional terhadap program atau visi kandidat. Dengan demikian, mobilisasi massa di Sampang bukan sekadar fenomena sosial spontan, melainkan strategi politik terorganisir yang memanfaatkan struktur sosial keagamaan dan informal yang telah berakar kuat dalam masyarakat.

Kedua, kekerasan simbolik berbasis budaya lokal, selain intimidasi non-fisik, peneliti menemukan adanya kekerasan simbolik yang memanfaatkan simbol, reputasi, dan pengaruh kekuasaan lokal. Kehadiran figur-figur tertentu di sekitar TPS atau ruang publik berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial yang bersifat intimidatif. Meskipun tidak disertai tindakan kekerasan secara langsung, kehadiran tersebut mampu menciptakan rasa takut dan membatasi ruang partisipasi politik warga. Seorang Tim Kampanye bernama Ali Wafa mengungkapkan:

*“Kadang cukup dengan hadir saja terdapat tekanan mas walau kita belum melakukan kampanye, karna orang sudah tahu itu wilayah siapa. Tidak perlu bicara, masyarakat langsung mengerti. Jadi saya sering disarankan masyarakat untuk tidak di daerah tertentu agar tidak terjadi kericuhan”*⁵²

⁵² Hasil Wawancara dengan Tim Kampanye Ali Wafa pada Tanggal 15 Desember 2025

Kekerasan simbolik ini sering kali dianggap sebagai bagian dari kebiasaan politik lokal yang telah berlangsung lama dan berulang dalam setiap pemilu. Selaras dengan penuturan Khoiruddin lebih lanjut ia menyampaikan:

*“Sudah biasa tiap pemilu ada orang-orang tertentu yang jaga. Masyarakat ikut saja biar aman.”*⁵³

Temuan peneliti menunjukkan bahwa kekerasan simbolik berbasis budaya lokal menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling signifikan selama Pemilu 2024 di Sampang. Dalam teori Tilly repertoar budaya lokal merupakan elemen penting dalam memahami kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang. Tilly menegaskan bahwa kekerasan politik tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan selalu tertanam dalam konteks budaya lokal yang membentuk cara-cara tertentu dalam melakukan tindakan kolektif.⁵⁴ Dalam konteks Sampang, repertoar budaya lokal yang meliputi simbol-simbol kekerasan tradisional, pengaruh pesantren, dan peran blater membentuk pola-pola kekerasan politik yang khas dan terinstitusionalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kehadiran figur-figur tertentu di sekitar TPS atau ruang publik, meskipun tidak disertai tindakan kekerasan secara langsung, mampu menciptakan rasa takut dan membatasi ruang partisipasi politik warga. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, *“kadang cukup dengan hadir saja sudah ada tekanan, karena orang sudah tahu itu wilayah siapa.”* Hal ini mencerminkan apa yang disebut Tilly sebagai *performative violence*, yaitu kekerasan yang dilakukan melalui pertunjukan simbolik untuk

⁵³ Hasil Wawancara dengan Khoiruddin Warga Sampang pada Tanggal 14 Desember 2025

⁵⁴ Tilly, *Regimes and Repertoires*.

menegaskan dominasi dan menciptakan efek intimidasi tanpa harus menggunakan kekerasan fisik secara langsung.⁵⁵

Penggunaan simbol-simbol kekerasan tradisional seperti celurit juga menjadi bagian dari repertoar budaya lokal dalam kekerasan politik elektoral di Sampang. Meskipun tidak selalu digunakan secara langsung, keberadaan celurit dalam konteks politik elektoral berfungsi sebagai simbol ancaman yang telah dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Bourdieu menjelaskan bahwa simbol-simbol seperti ini bekerja melalui mekanisme *symbolic violence*, yaitu bentuk dominasi yang dilegitimasi melalui sistem simbol dan budaya yang telah terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat.⁵⁶ Dalam konteks Sampang, simbol-simbol kekerasan tradisional tidak hanya mencerminkan potensi ancaman fisik, tetapi juga menegaskan hierarki kekuasaan dan posisi sosial aktor-aktor yang terlibat dalam arena politik.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah munculnya kekerasan simbolik berbasis budaya lokal yang mengiringi proses politik elektoral, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Sampang 2024. Sebagaimana diberitakan oleh *Bisnis.com* terjadi keributan di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, yang dipicu oleh persoalan distribusi undangan pencoblosan Pilkada. Dalam peristiwa tersebut, seorang pria berinisial S terlihat mengacungkan senjata tajam jenis celurit sambil melontarkan tantangan carok di hadapan warga. Aksi ini direkam dan kemudian tersebar luas melalui media sosial, sehingga memperkuat daya jangkauan serta efek simboliknya di ruang publik.

Gambar 3 : Keributan Jelang Pilkada Sampang 2024

⁵⁵ Tilly, *The Politics of Collective Violence*.

⁵⁶ Bourdieu, *Language and Symbolic Power*.



Sumber: Bisnis.com

Dengan demikian, peristiwa ini menjadi bukti empiris bahwa kekerasan politik elektoral tidak selalu tampil dalam bentuk kerusuhan massal atau bentrokan fisik secara langsung, tetapi juga hadir melalui praktik kekerasan simbolik yang berakar pada budaya lokal. Meskipun aparat kepolisian berhasil meredam situasi sebelum eskalasi menuju kekerasan fisik, secara sosiologis peristiwa ini menunjukkan bahwa simbol budaya dapat dimanfaatkan sebagai alat politisasi dan intimidasi dalam kontestasi demokrasi lokal.⁵⁷

Selanjutnya, temuan penelitian mengenai polarisasi sosial berbasis identitas kelompok juga mencerminkan bagaimana repertoar budaya lokal membentuk pola kekerasan politik di Sampang. Rivalitas antarpesantren, perbedaan hubungan antara keluarga besar, hingga persaingan antarjaringan blater dapat berubah menjadi konflik politis ketika memasuki musim pemilu. Kontestasi politik tidak hanya dilihat sebagai kompetisi kandidat, tetapi juga sebagai kompetisi simbolik antarkelompok sosial untuk

⁵⁷ Redaksi Bisnis.com, "Keributan Jelang Pilkada Sampang 2024, Polisi Buru Pria Bercelurit," *Bisnis.Com*, 2024, <https://surabaya.bisnis.com/read/20241126/531/1819308/keributan-jelang-pilkada-sampang-2024-polisi-buru-pria-bercelurit>.

mempertahankan kehormatan dan dominasi di wilayah masing-masing. Hal ini sejalan dengan argumen Tilly dan Tarrow bahwa kekerasan politik sering kali berakar pada konflik identitas dan kompetisi simbolik antarkelompok, di mana pertarungan politik menjadi medium untuk menegaskan posisi sosial dan kehormatan kolektif.⁵⁸

Dengan demikian, repertoar budaya lokal di Kabupaten Sampang yang meliputi simbol-simbol kekerasan tradisional, praktik patronase, dan polarisasi berbasis identitas kelompok membentuk pola-pola kekerasan politik yang khas dan terinstitusionalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kekerasan politik elektoral di Sampang bukan sekadar fenomena spontan, melainkan bagian dari repertoar tindakan kolektif yang telah berlangsung secara turun-temurun dan terintegrasi dalam struktur sosial dan budaya lokal.

Ketiga, Kekerasan Struktural melalui Relasi Patronase Politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi patron–klien menjadi salah satu sumber utama kekerasan struktural dalam pemilu. Ketergantungan masyarakat terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elite lokal menciptakan situasi di mana pilihan politik warga tidak sepenuhnya bersifat individual. Arahan politik dari patron sering dipahami sebagai kewajiban moral yang sulit untuk ditolak. Aliyanto ketua KPU Sampang menjelaskan: *“Kalau sudah ada arahan dari atas, warga biasanya ikut. Soalnya takut nanti kalau ada apa-apa tidak dibantu.”*⁵⁹

Pandangan tersebut diperkuat oleh pengakuan Humaidi sebagai masyarakat setempat:

⁵⁸ Tilly and Tarrow, *Contentious Politics*.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Aliyanto ketua KPU Sampang pada Tanggal 16 Desember 2025

*“Bukan soal suka atau tidak suka calon, tapi ikut siapa yang ngajak. Kalau yang ngajak orang yang memiliki pengaruh besar di desa biasanya warga ikut mas, takut kalau nanti terjadi apa-apa tidak dibantu mas”*⁶⁰

Kekerasan struktural ini tidak tampak sebagai pelanggaran hukum secara langsung, namun secara perlahan membatasi kebebasan politik warga dan menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam kontestasi elektoral. Temuan peneliti menunjukkan relasi patronase di Kabupaten Sampang ditandai oleh ketimpangan kekuasaan yang menempatkan klien sebagai alat mobilisasi politik bagi patron. Scott menjelaskan bahwa relasi patronase selalu bersifat asimetris, di mana patron memiliki kontrol atas sumber daya dan akses terhadap kekuasaan, sementara klien berada dalam posisi yang bergantung dan rentan.⁶¹ Dalam konteks Sampang, ketimpangan kekuasaan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan simbolik, di mana patron memiliki legitimasi kultural dan moral yang memungkinkan mereka mengontrol perilaku politik klien.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sampang sering kali tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan politik mereka karena adanya tekanan sosial dan ketergantungan terhadap patron. Pernyataan informan bahwa "bukan soal suka atau tidak suka calon, tapi ikut siapa yang ngajak" mencerminkan bagaimana klien telah menjadi alat mobilisasi politik yang digerakkan oleh kepentingan patron. Dalam situasi ini, klien tidak memiliki otonomi politik yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional terhadap program atau

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Humaidi Warga Sampang pada Tanggal 14 Desember 2025

⁶¹ Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia."

visi kandidat, melainkan harus mengikuti arahan patron sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial.

Gambar 4 : Suasana Dua Lurah Dilaporkan ke Bkpsdm Sampang



Sumber: harianbhirawa.co.id

Dalam kasus lain peneliti menemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum lurah & kades. Sebagaimana diberitakan, dua lurah di Kabupaten Sampang diduga terlibat politik praktis dengan mengarahkan dukungan warga kepada salah satu bakal calon bupati. Dugaan tersebut mencakup mobilisasi RT dan RW serta pengaitan program Anggaran Dana Kelurahan dengan dukungan politik tertentu.⁶² Praktik ini menciptakan relasi patron klien yang menempatkan masyarakat pada posisi tidak setara dalam menentukan pilihan politiknya. Scott menjelaskan bahwa relasi patronase menciptakan struktur ketergantungan yang melanggengkan dominasi patron dan membatasi kemampuan klien untuk melawan atau menuntut hak-hak politik mereka.⁶³ Dalam konteks Sampang, struktur ketergantungan ini tidak hanya berakar pada faktor

⁶² Redaksi Bhirawa, "Diduga Tak Netral, Dua Lurah Dilaporkan Ke BKPSDM Sampang," *Harian Bhirawa*, 2024, <https://harianbhirawa.co.id/diduga-tak-netral-dua-lurah-dilaporkan-ke-bkpsdm-sampang/>.

⁶³ Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia."

ekonomi, tetapi juga pada faktor sosial, budaya, dan religius yang membuat klien merasa berkewajiban untuk tetap loyal kepada patron, bahkan ketika loyalitas tersebut bertentangan dengan kepentingan personal atau hak politik mereka.

Dengan demikian, relasi patronase dan klientelisme di Kabupaten Sampang merupakan struktur politik yang sangat kuat dan terinstitusionalisasi, yang ditandai oleh pertukaran bantuan dan perlindungan dengan loyalitas suara, ikatan personal berbasis norma budaya dan utang budi, serta ketimpangan kekuasaan yang menempatkan klien sebagai alat mobilisasi politik. Struktur ini tidak hanya membentuk dinamika pemilu di Sampang, tetapi juga menjadi akar struktural dari kekerasan politik elektoral yang terjadi selama Pemilu 2024.

Keempat, kekerasan verbal dan polarisasi sosial. Bentuk kekerasan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kekerasan verbal yang muncul dalam interaksi antarpendingkat kandidat. Kekerasan ini berupa ujaran provokatif, saling menyalahkan, serta pelabelan negatif terhadap kelompok pendukung lain. Kekerasan verbal kerap terjadi dalam diskusi informal, aktivitas kampanye, dan percakapan sehari-hari di tengah masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, isu-isu provokatif tersebut bahkan terekam dalam sejumlah rekaman suara yang tersebar melalui media sosial pada masa pilkada Sampang 2024. Menurut laporan kepolisian, konten provokatif tersebut tengah diusut sebagai dugaan tindakan provokasi yang dilakukan oleh oknum pendukung pasangan calon, karena dinilai meresahkan masyarakat serta memiliki potensi besar dalam memicu eskalasi konflik politik yang lebih luas di

Kabupaten Sampang.⁶⁴ Sebagaimana disampaikan lebih jauh oleh relawan Abd. Waffar menuturkan:

*“Mon akandeh politik jiah biasa nas panasan ben gampang panas mas, yeh mon sala kandheh mas bisa rebut”*⁶⁵

“Kalau sudah bicara politik, gampang panas mas. Sedikit salah bicara langsung ribut.”

Polarisasi politik yang muncul akibat kekerasan verbal berdampak pada hubungan sosial antarwarga, sebagaimana disampaikan oleh seorang warga bernama Irsyad:

“Biasanah mon bedeh pelean warga abek jaga jarak mas, takok telopot sala ngucak”

*“Biasanya kalau beda pilihan, jadi agak jaga jarak. Takut salah ngomong.”*⁶⁶

Temuan peneliti menunjukkan adanya konflik non-realistis yang muncul dari ketegangan emosional, frustrasi, dan polarisasi sosial di tengah masyarakat Sampang. Coser menjelaskan bahwa konflik non-realistis tidak memiliki tujuan rasional yang jelas dan sering kali muncul sebagai bentuk pelepasan agresi atau ketegangan yang telah menumpuk dalam masyarakat.⁶⁷ Dalam konteks Sampang, konflik non-realistis dapat dilihat dari kekerasan verbal, polarisasi sosial berbasis identitas kelompok, dan penyebaran hoaks yang memicu ketegangan tanpa memberikan solusi terhadap masalah yang sebenarnya.

⁶⁴ Abd Aziz, “Polisi Usut Dugaan Kasus Provokasi Pilkada Sampang,” n.d., <https://jatim.antaranews.com/berita/843777/polisi-usut-dugaan-kasus-provokasi-pilkada-sampang>.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan relawan Abd. Waffar pada Tanggal 15 Desember 2025

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Irsyad Warga Sampang pada Tanggal 14 Desember 2025

⁶⁷ Coser, *Functions of Social Conflict*.

Temuan peneliti mengenai kekerasan verbal dan polarisasi sosial menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik dapat memicu ketegangan emosional yang berdampak pada hubungan sosial antarwarga. Pernyataan informan bahwa "*kalau sudah bicara politik, gampang panas*" mencerminkan bagaimana politik telah menjadi sumber ketegangan emosional yang sensitif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Coser menegaskan bahwa konflik non-realistis cenderung lebih sulit diselesaikan karena tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga dapat berlarut-larut dan memperburuk hubungan sosial antarkelompok.⁶⁸

Dalam hal ini, Coser menjelaskan bahwa konflik non-realistis dapat berfungsi sebagai katup pelepasan ketegangan sosial yang telah menumpuk dalam masyarakat.⁶⁹ Dalam konteks Sampang, polarisasi sosial berbasis identitas kelompok dan rivalitas antarpesantren dapat dipahami sebagai bentuk konflik non-realistis yang berfungsi untuk menyalurkan ketegangan emosional yang berakar pada ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Ketika masyarakat tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyampaikan aspirasi atau menyelesaikan masalah secara konstruktif, konflik non-realistis dapat menjadi mekanisme alternatif untuk melepaskan frustrasi, meskipun hal tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya.

Kelima, kekerasan digital dan penyebaran hoaks, penelitian ini juga menemukan bahwa kekerasan politik elektoral berkembang melalui ruang digital, khususnya melalui media sosial dan grup WhatsApp. Informasi yang tidak terverifikasi, isu provokatif, serta hoaks tentang proses pemilu tersebar dengan cepat dan memengaruhi

⁶⁸ Coser.

⁶⁹ Coser.

sikap politik masyarakat di tingkat lokal. Misalnya, sebuah video yang beredar di media sosial sempat memicu kekhawatiran dan kericuhan di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, karena narasi yang beredar menyatakan bahwa surat suara sudah tercoblos sebelum pemungutan suara, padahal klarifikasi resmi dari Ketua KPU Sampang menyatakan narasi tersebut tidak benar dan merupakan hoaks serta kesalahpahaman saja.⁷⁰

Sejalan dengan temuan di Sampang, organisasi pemeriksa fakta Mafindo mencatat bahwa jumlah hoaks yang beredar selama Pemilu 2024 meningkat tajam, dengan ribuan kasus hoaks yang teridentifikasi sepanjang semester pertama tahun 2024 dan diperkirakan akan berulang pada Pilkada 2024. Dalam siaran pers Mafindo dijelaskan bahwa penyebaran hoaks diprediksi akan terus terjadi sepanjang berbagai tahapan pemilu, termasuk pada tahapan lokal seperti Pilkada, sehingga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan proses demokrasi di daerah.⁷¹

Dalam hal lain Peneliti menemukan adanya kekerasan digital dalam bentuk pesan suara (voice note) yang disebarakan melalui aplikasi WhatsApp, yang mengandung unsur provokasi dan ancaman terselubung. Dalam salah satu pesan suara yang beredar di kalangan warga, terdapat pernyataan yang menegaskan bahwa apabila pasangan calon tertentu ditetapkan sebagai pemenang (calon mandat terpilih), maka situasi keamanan di Kabupaten Sampang tidak akan kondusif dan akan terjadi banyak pelanggaran serta kekacauan selama proses pemerintahan berlangsung. Narasi dalam

⁷⁰ Mediani Dyah Natalia, "Cek Fakta: Ricuh Di Sampang Karena Surat Suara Sudah Tercoblos," n.d., <https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/02/14/643/1164845/cek-fakta-muncul-video-ricuh-di-sampang-karena-surat-suara-sudah-tercoblos-ini-pernyataan-resmi-kpu-sampang>.

⁷¹ Mafindo, "Siaran Pers: Hoaks Meningkat Pada Pemilu 2024, Awas Berulang Di Pilkada," n.d., <https://mafindo.or.id/2024/08/30/siaran-pers-hoaks-meningkat-pada-pemilu-2024-awas-berulang-di-pilkada/>.

pesan tersebut disampaikan dengan nada persuasif sekaligus intimidatif, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi dan sikap politik masyarakat. Penyebaran pesan suara ini menunjukkan bagaimana media komunikasi digital dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun ketakutan kolektif, memperkuat polarisasi sosial, serta mendorong delegitimasi terhadap proses dan hasil Pilkada.

Gambar 5 : Pesan Suara Provokatif di Whatsapp



Sumber : Tiktok.com

Seorang relawan menjelaskan:

*“Di grup WA banyak kabar yang tidak jelas asalnya, tapi langsung dipercaya.”*⁷²

Pengurus partai PKB Sampang mengakui dampak dari kekerasan digital tersebut:

*“Hoaks itu cepat sekali menyebar dan sulit dikendalikan. Dampaknya ke masyarakat besar.”*⁷³

Kasus hoaks seperti ini memperlihatkan bagaimana konten digital yang belum terverifikasi dapat menyulut ketegangan sosial dan meningkatkan kecurigaan terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga memperluas jangkauan konflik politik dan mempercepat eskalasi ketegangan di tingkat lokal.

⁷² Hasil Wawancara dengan relawan Abd. Waffar pada Tanggal 15 Desember 2025

⁷³ Hasil Wawancara dengan Mushaddaq Chalili Pengurus Parpol PKB Sampang pada Tanggal 17 Desember 2025

Dalam kerangka teori Charles Tilly, kekerasan politik tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat muncul melalui mekanisme non-fisik yang berfungsi memperluas dan mempercepat kontestasi politik. Tilly menekankan bahwa perkembangan repertoar kekerasan mengikuti perubahan struktur sosial dan teknologi, sehingga dalam konteks masyarakat kontemporer, ruang digital menjadi arena baru bagi kontestasi politik yang bersifat konflikual.⁷⁴

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pilkada Sampang 2024, media sosial dan grup WhatsApp berperan sebagai medium utama penyebaran hoaks dan narasi provokatif yang tidak terverifikasi. Dalam perspektif Tilly, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk *diffuse political violence*, yakni kekerasan yang tidak terpusat, tidak selalu terorganisasi secara formal, namun berdampak luas dalam membentuk persepsi, emosi kolektif, dan pola tindakan politik masyarakat.

Kasus beredarnya video yang menarasikan bahwa surat suara telah tercablos sebelum hari pemungutan suara, yang kemudian memicu kekhawatiran dan keributan di Desa Gunung Kesan, menunjukkan bagaimana informasi digital berfungsi sebagai pemicu eskalasi konflik (*escalatory mechanism*). Meskipun klarifikasi resmi dari Ketua KPU Sampang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan kesalahpahaman, dampak sosial telah lebih dahulu terbentuk. Hal ini sejalan dengan pandangan Tilly bahwa kekerasan politik sering kali dipicu oleh interpretasi kolektif atas ancaman, bukan semata-mata oleh fakta objektif.

Pernyataan relawan yang menyebut bahwa informasi di grup WhatsApp “langsung dipercaya” memperlihatkan lemahnya kapasitas verifikasi informasi di

⁷⁴ Tilly, *Regimes and Repertoires*.

tingkat akar rumput. Dalam kerangka Tilly, kondisi ini mencerminkan kerentanan struktur sosial terhadap mobilisasi konflik, di mana jaringan informal seperti grup percakapan digital berfungsi sebagai sarana penyebaran emosi politik, kecurigaan, dan solidaritas semu antarpendukung politik.

Selain itu, pengakuan pengurus partai politik di tingkat lokal mengenai cepatnya penyebaran dan sulitnya pengendalian hoaks menegaskan bahwa kekerasan digital memiliki daya rusak struktural terhadap stabilitas sosial. Sejalan dengan temuan Mafindo tentang meningkatnya jumlah hoaks selama Pemilu 2024, fenomena ini menunjukkan bahwa penyebaran disinformasi telah menjadi bagian dari repertoar kontestasi politik modern, sebagaimana dipahami oleh Tilly, di mana konflik tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang simbolik dan digital.

Gambar 6 : Gambar Black Campaign saat Pilkada Sampang



Sumber : jatimsatunews.com

Dalam sumber lain, peneliti juga menemukan penyebaran hoaks melalui media sosial tiktok. Sebagaimana diberitakan oleh *Jatimsatunews.com*, dua akun TikTok, @BuletinJawaTimur dan @KlebunKonoha, diduga menyebarkan konten video bermuatan narasi negatif dan tidak berdasar yang menyerang pasangan calon nomor urut 2, H. Slamet Junaidi dan Lora Mahfud Abdul Qadir, yang dinilai sebagai bentuk black campaign. Konten tersebut membentuk persepsi negatif di ruang publik dan memicu respons dari tim pasangan calon yang menilai materi tersebut mengandung unsur fitnah, sekaligus berkontribusi pada polarisasi sosial berbasis disinformasi dalam kontestasi elektoral.⁷⁵

Dengan demikian, kekerasan digital dan penyebaran hoaks dalam Pilkada Sampang 2024 berfungsi sebagai akselerator konflik politik, memperluas jangkauan kekerasan dari ranah fisik ke ranah kognitif dan emosional masyarakat. Dalam perspektif Charles Tilly, kondisi ini memperlihatkan bagaimana perubahan medium komunikasi politik turut mengubah pola dan intensitas kekerasan politik, serta meningkatkan potensi eskalasi konflik elektoral di tingkat lokal ketika tidak diimbangi dengan kapasitas pengendalian informasi dan literasi politik yang memadai.

Keenam, kekerasan fisik sebagai eskalasi konflik, meskipun tidak menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan, kekerasan fisik tetap muncul sebagai bentuk eskalasi dari konflik yang telah berlangsung sebelumnya. Kekerasan fisik umumnya terjadi setelah akumulasi tekanan sosial, provokasi verbal, dan penyebaran hoaks yang tidak tertangani dengan baik. Dalam konteks Pilkada Sampang 2024, kekerasan fisik

⁷⁵ Admin JSN, "Black Campaign, Dua Akun TikTok Di Sampang Mendapat Tanggapan Serius Dari Jubir Tim Jimad Sakteh," *Jatimsatunews.Com*, 2024, <https://www.jatimsatunews.com/2024/10/black-campaign-dua-akun-tiktok-di.html>.

ini bahkan berujung pada hilangnya nyawa seorang pendukung calon bupati, yang menunjukkan bagaimana konflik elektoral yang awalnya bersifat laten dapat berubah menjadi tindakan fisik ekstrem di lapangan.

Berdasarkan temuan peneliti salah satu pendukung calon bupati di Kabupaten Sampang, yakni Jimmy Sugito Putra, menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam seperti celurit. Kejadian ini terjadi setelah rombongan pendukung calon menghadapi adangan dan ketegangan di Desa Ketapang Laok, dan kemudian berkembang menjadi serangan yang berujung pada luka serius dan kematian korban. Insiden ini sebagai salah satu indikasi bahwa konflik politik di Sampang telah mencapai titik yang sangat rawan dan berpotensi memicu kekerasan yang lebih luas.⁷⁶ Seorang penyelenggara pemilu Aliyanto dalam penelitian ini juga menyatakan:

⁷⁶ BBC News, "Kasus Pengeroyokan Di Sampang Berujung Kematian Pendukung Calon Bupati – Apa Motif Di Balik Insiden Itu?," n.d., <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5yrxg8ljyxo>.

Gambar 7 : Suasana saat Penyerangan di Ketapang Laok



Sumber : BBC.Com

“Kalau sudah banyak tekanan dan isu, sedikit pemicu saja bisa jadi keributan, seperti yang terjadi kemarin itu mas di Ketapang Laok pemicu keributan sampai ada meninggal itu penyebabnya karna Paslon Jih Idi dihadap saat melakukan kunjungan lalu pendukungnya tidak terima”⁷⁷

Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan puncak dari rangkaian konflik politik elektoral yang sebelumnya berkembang secara laten di tengah masyarakat, terutama ketika ketegangan sosial tidak diantisipasi dengan strategi pencegahan yang memadai dan ketika sentimen politik dipicu oleh peristiwa yang menguras emosi warga.

Dalam perspektif Charles Tilly, kekerasan politik tidak dipahami sebagai tindakan spontan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari repertoar

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Aliyanto ketua KPU Sampang pada Tanggal 16 Desember 2025

kontestasi politik yang muncul ketika aktor-aktor kolektif menilai bahwa jalur institusional tidak lagi efektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Tilly menekankan bahwa kekerasan kerap menjadi hasil eskalasi konflik akibat akumulasi ketegangan struktural, relasi kekuasaan yang timpang, serta kegagalan mekanisme pengendalian konflik.⁷⁸

Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam Pilkada Sampang 2024 berfungsi sebagai titik kulminasi konflik elektoral laten yang sebelumnya berkembang melalui tekanan sosial, provokasi verbal, dan penyebaran hoaks. Dalam kerangka Tilly, kondisi ini merefleksikan proses *escalation of contention*, di mana konflik yang semula bersifat simbolik dan non-fisik bertransformasi menjadi kekerasan terbuka ketika batas toleransi sosial terlampaui.

Kasus pengeroyokan terhadap Jimmy Sugito Putra oleh sekelompok orang bersenjata tajam, sebagaimana diberitakan oleh BBC News, dapat dipahami sebagai bentuk *collective violence* dalam istilah Tilly, yakni kekerasan yang dilakukan oleh aktor kolektif dengan motif politik dan terjadi dalam konteks kompetisi kekuasaan elektoral. Peristiwa penghadangan rombongan pendukung calon bupati di Desa Ketapang Laok berfungsi sebagai pemicu (*triggering event*) yang mempercepat eskalasi konflik, namun bukan sebagai penyebab utama. Kekerasan tersebut muncul karena adanya akumulasi *grievance* politik yang sebelumnya telah terbangun di tengah masyarakat.

Pernyataan Aliyanto selaku penyelenggara pemilu memperkuat analisis ini. Ia menegaskan bahwa tekanan sosial dan isu politik yang beredar luas menciptakan situasi

⁷⁸ Tilly, *The Politics of Collective Violence*.

yang sangat rapuh, sehingga “*sedikit pemicu saja bisa jadi keributan.*” Dalam kerangka Tilly, kondisi ini mencerminkan *low capacity for conflict containment*, di mana negara dan institusi penyelenggara pemilu tidak sepenuhnya mampu meredam ketegangan sosial yang telah terpolarisasi secara politik.

Selanjutnya, kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa menunjukkan bahwa konflik elektoral di Sampang telah melampaui fase kontestasi normal dan memasuki tahap *high risk contention*, sebagaimana dikemukakan Tilly, ketika aktor politik dan pendukungnya menganggap penggunaan kekerasan sebagai cara yang sah untuk mempertahankan kehormatan kelompok dan kepentingan politik. Dengan demikian, kekerasan fisik dalam Pilkada Sampang 2024 bukanlah anomali, melainkan bagian dari dinamika konflik politik yang terstruktur, berakar pada relasi sosial politik lokal, dan dipicu oleh kegagalan pencegahan konflik secara dini.

C. Faktor-Faktor Kekerasan Politik Elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang

Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya mengenai bentuk-bentuk kekerasan politik elektoral, rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi selama Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa kekerasan tersebut bukan sekadar tindakan insidental yang muncul secara spontan. Sebaliknya, kekerasan politik elektoral merupakan fenomena sosial yang lahir dari interaksi berbagai faktor struktural, kultural, dan politik yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai faktor-faktor kekerasan politik elektoral menjadi penting untuk memahami mengapa praktik kekerasan tersebut dapat muncul, berkembang, dan berulang dalam setiap tahapan pemilu. Berdasarkan hasil temuan

penelitian di lapangan, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang diuraikan sebagai berikut.

Pertama, fanatisme politik berbasis tokoh menjadi salah satu faktor utama terjadinya kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang adalah fanatisme politik yang berakar pada figur tokoh berpengaruh, khususnya tokoh agama dan elite lokal. Preferensi politik masyarakat cenderung dipersonalisasi pada sosok tertentu, sehingga loyalitas terhadap tokoh sering kali melampaui pertimbangan rasional terhadap visi, misi, maupun program kerja kandidat.

Peneliti menemukan bahwa fanatisme politik berbasis tokoh menjadi salah satu faktor terbentuknya kekerasan politik elektoral dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang. Hal ini tercermin dari pemasangan spanduk bertuliskan “tidak peduli merah biru tetap milih guru” yang menegaskan loyalitas politik kepada figur tokoh tertentu. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa spanduk tersebut memperkuat polarisasi dan batas identitas politik antarpending. Fanatisme terhadap tokoh panutan mendorong sikap eksklusif yang dapat berkembang menjadi tekanan sosial, intimidasi, dan konflik terbuka. Dengan demikian, spanduk ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye simbolik, tetapi juga menjadi medium kekerasan simbolik yang memperkuat relasi kuasa dan membuka ruang eskalasi kekerasan politik elektoral berbasis loyalitas tokoh dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang.

Gambar 8 : Bentuk Fanatisme Politik



Sumber : Facebook

Selain itu, berdasarkan temuan peneliti pada media survei ELSIPOL pada Pilkada Sampang 2024 menunjukkan bahwa tingkat kedisukaan (*likeability*) terhadap figur calon mencapai lebih dari 90 persen, serta pengaruh tokoh masyarakat menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan pilihan politik warga. Dalam konteks Pilkada Sampang 2024, keunggulan pasangan calon MANDAT tidak terlepas dari tingginya tingkat kesukaan masyarakat terhadap sosok calon bupati KH Muhammad Bin Muafi Zaini (Gus Mamak), yang dikenal luas sebagai tokoh agama berpengaruh di wilayah tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pilihan politik masyarakat tidak sepenuhnya dibangun atas dasar evaluasi programatik atau visi kebijakan kandidat, melainkan sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional, kepercayaan moral, dan makna simbolik yang dilekatkan pada figur tokoh panutan.⁷⁹

Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membela pilihan politik tokohnya secara berlebihan, bahkan ketika sikap tersebut berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang tokoh agama Jakfar Sodik yang menyampaikan:

⁷⁹ Lukman Hakim, "Hasil Terbaru Survei Pilbup Sampang 2024 Versi Elsipol," n.d., <https://surabaya.inews.id/read/523514/ini-hasil-terbaru-survei-pilbup-sampang-2024-versi-elsipol-pasca-insiden-mengerikan>.

“lok taoh yeh mas, mon oresen pelean kiai, jamaah jiah biasanah total abela, kadeng bedhe warga atanyah dek kiai jiah mas meleh sapah ben jiah siap e dukung bik warga mas”

“Gak tau ya mas kalau sudah soal pilihan kiai, jamaah biasanya total membela. Seringkali warga itu bertanya kepada kiai milih paslon siapa dan kami siap mendukung.”⁸⁰

Fanatisme politik berbasis tokoh ini mempersempit ruang dialog dan toleransi politik, karena perbedaan pilihan tidak lagi dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, melainkan sebagai bentuk penyimpangan dari loyalitas terhadap tokoh. Akibatnya, potensi gesekan antarpendingukung meningkat, terutama ketika tokoh panutan yang dihormati masyarakat memiliki perbedaan sikap politik yang tajam.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa kiai memiliki posisi yang sangat tinggi dalam hierarki sosial masyarakat Sampang, dan keputusan politik mereka dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam skala besar. Dalam teori Tilly menyebutkan legitimasi moral merupakan dimensi penting dalam memahami kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang, terutama dalam konteks otoritas religius yang dimiliki oleh kiai. Tilly menegaskan bahwa kekerasan politik tidak hanya bergantung pada kapasitas material dan organisasional, tetapi juga pada kemampuan aktor politik untuk melegitimasi tindakan mereka melalui nilai-nilai moral dan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.⁸¹ Dalam konteks Sampang, otoritas religius kiai menjadi sumber legitimasi moral yang sangat kuat, sehingga arahan politik dari kiai tidak hanya dipahami sebagai pilihan politik, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Jakfar Sodik Tokoh Masyarakat pada Tanggal 13 Desember 2025

⁸¹ Tilly, “From Mobilization to Revolution.”

Pernyataan informan bahwa "*kalau sudah soal pilihan kiai, jamaah biasanya total membela*" mencerminkan bagaimana otoritas religius ditransformasikan menjadi legitimasi politik. Dukungan politik dari kiai sering dianggap sebagai bentuk restu dan arahan religius, sehingga masyarakat menghubungkannya dengan ketaatan moral. Hal ini sejalan dengan argumen Tilly bahwa legitimasi moral merupakan sumber daya politik yang sangat efektif karena mampu mengubah kepentingan politik menjadi kewajiban moral yang sulit untuk ditolak.⁸²

Dalam hal ini, legitimasi moral yang bersumber dari otoritas religius juga membentuk mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Sampang. Masyarakat yang tidak mengikuti arahan politik kiai tidak hanya dipandang sebagai individu yang berbeda pilihan politik, tetapi juga sebagai individu yang tidak taat secara moral dan religius. Temuan peneliti menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa "*tidak enak sebagai murid*" jika berbeda pilihan dengan kiai mereka. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Bourdieu sebagai *symbolic violence*, yaitu bentuk dominasi yang bekerja melalui mekanisme internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial, sehingga individu secara sukarela menyesuaikan perilaku mereka dengan ekspektasi yang ditetapkan oleh otoritas yang dianggap legitim.⁸³

Selain itu, legitimasi moral juga berperan dalam membenarkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam konteks politik elektoral. Dalam beberapa kasus, kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh pendukung kandidat tertentu dipandang sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan patron atau kelompok sosial mereka. Hal ini sejalan dengan argumen Tilly dan Tarrow bahwa legitimasi

⁸² Tilly, *The Politics of Collective Violence*.

⁸³ Bourdieu, *Language and Symbolic Power*.

moral dapat mengubah tindakan kekerasan menjadi tindakan yang dianggap benar dan bermartabat dalam konteks budaya tertentu.⁸⁴ Dalam konteks Sampang, pembelaan terhadap pilihan politik kiai atau tokoh berpengaruh lainnya dapat dipahami sebagai bentuk loyalitas moral yang harus dijaga, bahkan jika hal tersebut berpotensi memicu konflik atau kekerasan.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa legitimasi moral tidak hanya bekerja dalam konteks dukungan terhadap kandidat tertentu, tetapi juga dalam konteks penolakan terhadap kandidat lain. Ketika seorang kiai atau tokoh berpengaruh menyatakan penolakan terhadap kandidat tertentu, pernyataan tersebut dapat memicu mobilisasi massa untuk melawan atau menghalangi kampanye kandidat yang ditolak. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Tilly sebagai *boundary activation*, yaitu proses di mana identitas kelompok dan batas-batas sosial diaktifkan untuk memobilisasi dukungan atau penolakan terhadap aktor politik tertentu.⁸⁵ Dalam konteks Sampang, legitimasi moral yang bersumber dari otoritas religius kiai dapat memperkuat polarisasi sosial dan meningkatkan potensi konflik antarpending kandidat yang berbeda.

Dengan demikian, legitimasi moral yang bersumber dari otoritas religius kiai merupakan elemen krusial dalam kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang. Legitimasi moral tidak hanya memfasilitasi mobilisasi massa dan menciptakan loyalitas politik yang kuat, tetapi juga membenarkan penggunaan kekerasan atau intimidasi dalam konteks pembelaan terhadap kehormatan kelompok dan patron. Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan politik elektoral di Sampang bukan sekadar

⁸⁴ Tilly and Tarrow, *Contentious Politics*.

⁸⁵ Tilly, *The Politics of Collective Violence*.

fenomena material, tetapi juga fenomena moral dan religius yang tertanam dalam struktur sosial dan budaya masyarakat.

Kedua, budaya patronase dan relasi kuasa lokal yang kuat di Kabupaten Sampang menjadi faktor struktural yang mendorong terjadinya kekerasan politik elektoral. Relasi patron–klien antara elite lokal dan masyarakat menciptakan ketergantungan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kebebasan politik warga. Dalam situasi ini, arahan politik dari patron dipahami sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Sebagaimana menurut Ach. Khoiri menyebutkan dalam pelaksanaan pemilu di Madura termasuk Sampang, figur berpengaruh seperti tokoh sosial budaya (kiai dan blater) hampir selalu menentukan kemenangan kandidat sehingga implementasi pemilu belum mencerminkan kedaulatan pemilih secara individual.⁸⁶ Irsyad selaku masyarakat menjelaskan:

“Warga jiah biasa nah norok ke sapah se bantu oreng jiah mas, mon tak norok takok degghi lok e bantu pole ben edina aghi”

“Warga ikut siapa yang selama ini membantu mereka. Kalau tidak ikut, takut nanti tidak dibantu lagi dan ditinggalkan.”⁸⁷

Relasi kuasa ini membatasi pilihan politik masyarakat dan menciptakan tekanan laten yang berpotensi memicu konflik, terutama ketika terjadi persaingan antarpatron.antarpatron.

Temuan peneliti menunjukkan relasi patronase di Kabupaten Sampang ditandai oleh ikatan personal yang berbasis pada norma budaya dan konsep utang budi. Scott

⁸⁶ Ach Khoiri et al., “The Role of Kiai and Blater in the Regional Election in Madura: Discourse on Legal Culture,” *Trunojoyo Law Review* 6, no. 2 (2024): 211–33.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Irsyad Warga Sampang pada Tanggal 14 Desember 2025

menegaskan bahwa relasi patronase tidak hanya didasarkan pada pertukaran ekonomi, tetapi juga pada ikatan emosional dan moral yang membentuk rasa saling percaya dan loyalitas jangka panjang.⁸⁸ Dalam konteks Sampang, ikatan personal antara patron dan klien terbentuk melalui interaksi sosial yang intens dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan keagamaan, pertemuan desa, atau acara-acara sosial lainnya.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Sampang memiliki rasa hormat dan loyalitas yang sangat kuat terhadap kiai dan tokoh masyarakat yang telah memberikan bimbingan spiritual dan bantuan sosial dalam kehidupan mereka. Pernyataan informan bahwa "warga ikut siapa yang ngajak, takut kalau nanti terjadi apa-apa tidak dibantu" mencerminkan bagaimana rasa utang budi telah terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat. Utang budi ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi untuk menjaga kehormatan dan hubungan sosial yang baik dengan patron.

Selanjutnya, ikatan personal berbasis norma budaya juga membentuk mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Sampang. Ketika seseorang tidak mengikuti arahan politik patron, hal tersebut tidak hanya dipandang sebagai perbedaan pilihan politik, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ikatan personal dan norma budaya yang telah terbangun. Hal ini sejalan dengan argumen Scott bahwa relasi patronase menciptakan sistem kewajiban moral yang mengikat klien untuk tetap loyal kepada patron, bahkan ketika kepentingan personal klien tidak sepenuhnya terpenuhi.⁸⁹ Dalam konteks Sampang, norma budaya seperti rasa hormat terhadap kiai, solidaritas

⁸⁸ Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia."

⁸⁹ Scott.

komunal, dan konsep utang budi memperkuat ikatan personal antara patron dan klien, sehingga membuat relasi patronase menjadi sangat resilien dan sulit untuk diubah.

Ketiga, lemahnya pendidikan politik masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan elektoral di Kabupaten Sampang. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami hak politiknya sebagai individu yang bebas menentukan pilihan. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial, isu provokatif, dan informasi yang tidak terverifikasi. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap pendidikan politik formal maupun informal di wilayah Kepulauan Madura, yang berdampak pada rendahnya kesadaran hak dan kewajiban politik warga serta keterlibatan mereka secara aktif dalam ruang demokrasi. Berdasarkan penelitian Hidayat dan Hasan tentang partisipasi politik di Madura menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak-hak politik dan proses demokrasi masih sangat terbatas, sehingga diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif dari pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat partisipasi politik warga di Madura.⁹⁰ Seorang penyelenggara pemilu menyampaikan:

*“Masih banyak warga yang ikut-ikutan tanpa tahu program calon. Yang penting ikut tokoh.”*⁹¹

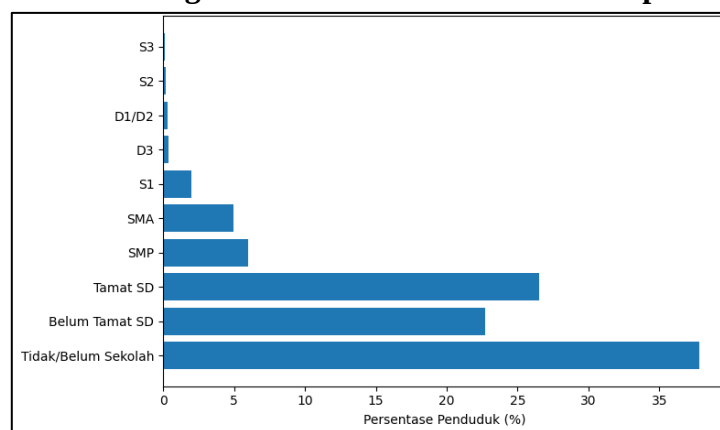
Kondisi ini berkaitan erat dengan lemahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sampang. Data menunjukkan bahwa 37,81% penduduk tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, sementara 22,73% lainnya belum menamatkan

⁹⁰ Ahmad Hasan Ubaid et al., “Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Warga Kepulauan Madura” 4, no. 3 (2022): 322–29.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Aliyanto ketua KPU Sampang pada Tanggal 16 Desember 2025

pendidikan dasar. Pada saat yang sama, proporsi penduduk yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi tergolong sangat rendah, dengan hanya sekitar 4,93% lulusan SMA dan 2,01% lulusan perguruan tinggi. Dominasi pendidikan dasar hingga tingkat SD/SMP ini mencerminkan rendahnya kapasitas literasi politik masyarakat. Akibatnya, praktik politik identitas semakin menguat dan rasionalitas dalam proses demokrasi lokal melemah.

Gambar 9 : Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sampang



Sumber : databoks.katadata.co.id

Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman memadai tentang mekanisme demokrasi, hak pilih, serta fungsi lembaga politik, mereka menjadi lebih rentan dimobilisasi oleh elite atau tokoh berpengaruh tanpa pertimbangan rasional, sehingga potensi konflik dan kekerasan politis meningkat.

Dalam perspektif Charles Tilly, kekerasan politik lebih mudah muncul dalam masyarakat yang memiliki kapasitas kewargaan rendah, yaitu ketika warga tidak memahami hak politik, mekanisme demokrasi, serta saluran institusional untuk menyalurkan kepentingan secara damai. Kondisi ini membuka ruang bagi elite dan tokoh lokal untuk memobilisasi massa melalui tekanan sosial dan loyalitas personal, sehingga konflik politik rentan berkembang menjadi kekerasan.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Sampang menjadi faktor penting dalam terbentuknya kekerasan politik elektoral. Banyak warga belum sepenuhnya memahami hak pilihnya sebagai individu yang bebas, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh isu provokatif, informasi tidak terverifikasi, dan arahan tokoh berpengaruh. Pernyataan penyelenggara pemilu bahwa masyarakat sering “ikut-ikutan tanpa tahu program calon” mencerminkan dominasi politik patronase dibandingkan partisipasi politik yang rasional.

Data tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sampang yang didominasi oleh warga tanpa pendidikan formal dan lulusan pendidikan dasar memperkuat temuan ini. Dalam kerangka Tilly, rendahnya tingkat pendidikan tersebut melemahkan kemampuan masyarakat dalam menilai klaim politik secara kritis dan mempersempit repertoar kontestasi politik yang damai. Akibatnya, konflik elektoral lebih mudah dimobilisasi secara emosional dan kolektif, sehingga meningkatkan potensi eskalasi konflik menjadi kekerasan politik.

Dengan demikian, lemahnya pendidikan politik masyarakat berfungsi sebagai faktor struktural yang memungkinkan kekerasan politik berkembang dalam Pilkada Sampang 2024, karena konflik tidak disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang rasional, melainkan melalui mobilisasi sosial yang berbasis loyalitas, emosi, dan tekanan kelompok.

Keempat, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan pemilu, faktor lain yang berkontribusi terhadap kekerasan politik elektoral adalah lemahnya pengawasan dan penegakan aturan pemilu. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan

sering kali menghadapi kendala, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor lokal yang memiliki pengaruh kuat. Seorang penyelenggara pemilu menuturkan:

*“Kami sering serba salah. Kalau ditindak, ada tekanan. Kalau dibiarkan, konflik bisa meluas.”*⁹²

Lemahnya penegakan hukum ini menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan praktik intimidasi dan kekerasan terus berulang tanpa sanksi yang tegas. Temuan peneliti menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan aturan pemilu menjadi salah satu faktor utama yang membuka ruang bagi kekerasan politik elektoral. Dalam teori kekerasan politik Charles Tilly struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) merupakan faktor penentu dalam hal ini sehingga dapat menjelaskan mengapa kekerasan politik dapat muncul dan berkembang dalam konteks tertentu. Tilly mendefinisikan struktur kesempatan politik sebagai kondisi-kondisi eksternal yang memfasilitasi atau membatasi tindakan kolektif, termasuk kekerasan politik.⁹³ Dalam konteks Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang, struktur kesempatan politik terbentuk melalui kombinasi antara lemahnya kontrol institusional, dominasi aktor informal, dan keterbatasan penegakan hukum.

Pernyataan penyelenggara pemilu bahwa *“kami sering serba salah, kalau ditindak ada tekanan, kalau dibiarkan konflik bisa meluas”* mencerminkan dilema struktural yang dihadapi oleh institusi formal dalam menghadapi dominasi aktor informal. Hal ini sejalan dengan argumen Tilly dan Tarrow bahwa kekerasan politik cenderung meningkat ketika institusi formal tidak mampu menjalankan fungsi kontrol

⁹² Hasil Wawancara dengan Aliyanto ketua KPU Sampang pada Tanggal 16 Desember 2025

⁹³ Tilly, “From Mobilization to Revolution.”

dan penegakan aturan secara efektif, sehingga menciptakan *political vacuum* yang diisi oleh aktor-aktor informal dengan mekanisme kontrol mereka sendiri.⁹⁴

Dalam hal ini, dominasi kiai dan blater dalam struktur sosial Sampang menciptakan sistem kekuasaan paralel yang sering kali lebih berpengaruh daripada institusi formal. Khoiri et al. menunjukkan bahwa implementasi pemilu di Madura, termasuk Sampang, belum mencerminkan kedaulatan pemilih secara individual karena dominasi tokoh sosial budaya seperti kiai dan blater.⁹⁵ Kondisi ini menciptakan struktur kesempatan politik yang memungkinkan aktor informal untuk menjalankan kontrol sosial tanpa batasan yang jelas dari institusi formal. Ketika institusi formal seperti KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas, ruang bagi kekerasan politik elektoral menjadi semakin terbuka.

Kelima, persaingan elite politik lokal menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan eskalasi konflik elektoral. Kontestasi politik di Sampang tidak hanya dipahami sebagai kompetisi ide dan program, tetapi juga sebagai perebutan pengaruh dan kekuasaan di tingkat lokal. Persaingan ini sering kali melibatkan jaringan massa yang loyal dan siap dimobilisasi. Ketegangan di antara pendukung paslon yang berbeda diduga dapat dipicu oleh rivalitas yang tidak sehat yang terkait dengan perebutan sumber daya ekonomi dan kontrol atas kekuasaan lokal, yang bersifat emosional dan sangat kontekstual terhadap identitas kelompok. Seorang tim kampanye mengungkapkan:

⁹⁴ Tilly and Tarrow, *Contentious Politics*.

⁹⁵ Khoiri et al., "The Role of Kiai and Blater in the Regional Election in Madura: Discourse on Legal Culture."

*“Kalau elite sudah bersaing keras, pendukung di bawah ikut panas.”*⁹⁶

Temuan peneliti menunjukkan bahwa ketika kiai memberikan arahan politik, jamaah cenderung mengikuti secara total, bahkan tanpa pemahaman mendalam mengenai program kandidat. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Tilly sebagai *repertoire of contention*, yaitu pola tindakan kolektif yang telah terinstitusionalisasi dalam budaya politik lokal.⁹⁷ Dalam konteks Sampang, mobilisasi massa melalui jaringan pesantren dan komunitas lokal merupakan bagian dari repertoar politik yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga menjadi strategi yang efektif dan terlegitimasi secara sosial.

Kombinasi antara sumber daya material, pengaruh sosial, dan massa yang terorganisir menciptakan struktur kekuasaan yang asimetris dalam proses pemilu. Elite politik yang memiliki akses terhadap ketiga jenis sumber daya ini memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, sehingga mampu mendominasi arena politik lokal dan meminimalkan ruang kompetisi yang setara. Kondisi ini tidak hanya memperkuat praktik patronase, tetapi juga meningkatkan potensi kekerasan politik ketika terjadi persaingan antara jaringan patron yang berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, “kalau elite sudah bersaing keras, pendukung di bawah ikut panas,” menunjukkan bahwa konflik antarelite dapat dengan mudah berubah menjadi konflik massa ketika sumber daya politik dimobilisasi secara intensif.

Temuan dari laporan media juga menunjukkan bagaimana konflik antarpengukung calon kepala daerah di Kabupaten Sampang pernah memuncak menjadi insiden berdarah. Menurut laporan tersebut, setelah terjadi cekcok verbal,

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Tim Kampanye Ali Wafa pada Tanggal 15 Desember 2025

⁹⁷ Tilly, *The Politics of Collective Violence*.

kontak fisik menyebabkan satu warga tewas karena sabetan senjata tajam, sebuah peristiwa yang menunjukkan bagaimana rivalitas politik lokal dapat bereskalasi menjadi kekerasan fatal apabila tidak dimitigasi secara serius.⁹⁸

Persaingan elite yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mendorong penggunaan cara-cara informal dan koersif dalam meraih dukungan politik, serta meningkatkan risiko konflik antarpending paslon yang berbeda.

Selain itu, konflik politik elektoral di Kabupaten Sampang merupakan konflik realistik yang berakar pada perebutan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya politik. Persaingan antara elite politik lokal, sebagaimana diungkapkan dalam temuan penelitian, tidak hanya dipahami sebagai kompetisi ide dan program, tetapi juga sebagai perebutan pengaruh dan kekuasaan di tingkat lokal. Pernyataan informan bahwa "kalau elite sudah bersaing keras, pendukung di bawah ikut panas" menunjukkan bahwa konflik di tingkat massa merupakan refleksi dari konflik elite yang lebih besar.

Coser menjelaskan bahwa konflik realistik memiliki tujuan yang jelas dan dapat diselesaikan melalui negosiasi atau kompromi ketika tujuan tersebut tercapai.⁹⁹ Namun, dalam konteks Sampang, konflik realistik sering kali berubah menjadi konflik yang lebih intens karena melibatkan tidak hanya kepentingan material, tetapi juga kehormatan dan legitimasi sosial. Temuan penelitian mengenai insiden pengeroyokan yang menyebabkan kematian seorang pendukung calon bupati menunjukkan bahwa

⁹⁸ Mochammad Fajar Nur, "Pilkada Berdarah Di Sampang: Alarm Pentingnya Mitigasi Konflik," n.d., <https://tirto.id/pilkada-berdarah-di-sampang-alarm-pentingnya-mitigasi-konflik-g5Yc>.

⁹⁹ Coser, *Functions of Social Conflict*.

perebutan kekuasaan dapat berujung pada eskalasi kekerasan yang fatal ketika tidak dikelola dengan baik.

Selanjutnya, konflik realistik di Sampang juga terkait dengan perebutan sumber daya ekonomi dan kontrol atas jaringan patronase. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang dan pembagian bantuan material menjadi bagian dari strategi politik yang digunakan oleh kandidat untuk meraih dukungan. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor primer dan tingkat kemiskinan yang tinggi (20,83%) membuat sumber daya material menjadi aset politik yang sangat berharga.¹⁰⁰ Ketika terjadi persaingan antara dua atau lebih jaringan patron yang memiliki akses berbeda terhadap sumber daya ekonomi, konflik realistik dapat dengan mudah muncul dan berubah menjadi kekerasan terbuka.

Keenam, peran media sosial dan penyebaran informasi provokatif, media sosial menjadi faktor penting dalam mempercepat penyebaran kekerasan politik elektoral. Informasi provokatif, hoaks, dan narasi kebencian menyebar dengan cepat melalui grup percakapan digital, terutama WhatsApp. Informasi tersebut sering kali diterima tanpa verifikasi dan memicu reaksi emosional masyarakat. Seorang relawan menjelaskan:

*“Sekali ada kabar di WA, langsung dipercaya dan menyebar ke mana-mana.”*¹⁰¹

Penyebaran informasi provokatif ini memperbesar potensi konflik dan mempercepat eskalasi kekerasan di tingkat akar rumput. Dalam perspektif Charles Tilly, kekerasan politik muncul ketika terdapat mekanisme-mekanisme kausal yang

¹⁰⁰ Agus Dwi Darmawan, “20.83% of the Population in Sampang Regency Is Classified as Poor,” *Databoks Katadata* (Katadata Insight Center, 2024), <https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/7d3a98295479246/2083-of-the-population-in-sampang-regency-is-classified-as-poor>.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan relawan Abd. Waffar pada Tanggal 15 Desember 2025

mendorong eskalasi kontestasi politik dari bentuk non-kekerasan menuju kekerasan terbuka. Salah satu mekanisme penting tersebut adalah penyebaran klaim politik yang memobilisasi emosi kolektif, terutama ketika berlangsung melalui jaringan sosial yang tidak terkontrol secara institusional

Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa media sosial khususnya grup WhatsApp berperan sebagai faktor struktural yang mempercepat terbentuknya kekerasan politik di Kabupaten Sampang. Informasi provokatif, hoaks, dan narasi kebencian menyebar secara cepat melalui jaringan komunikasi informal, tanpa proses verifikasi yang memadai. Dalam kerangka Tilly, kondisi ini mencerminkan *low cost mobilization*, yakni situasi ketika mobilisasi konflik dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tanpa organisasi formal.¹⁰²

Pernyataan relawan yang menyebut bahwa informasi di WhatsApp “*langsung dipercaya dan menyebar ke mana-mana*” menunjukkan bagaimana media sosial membentuk interpretasi kolektif atas ancaman politik. Menurut Tilly, kekerasan politik sering kali dipicu bukan oleh realitas objektif semata, melainkan oleh persepsi bersama bahwa kepentingan kelompok sedang terancam. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai arena produksi makna konflik, di mana isu politik dibingkai secara emosional dan antagonistik.

Selain itu, penyebaran informasi provokatif melalui media sosial berkontribusi pada terbentuknya polarisasi sosial di tingkat lokal, yang merupakan prasyarat penting munculnya kekerasan politik menurut Tilly. Ketika masyarakat terbelah secara tajam berdasarkan afiliasi politik, ruang kompromi menyempit dan tindakan kekerasan mulai

¹⁰² Tilly, “From Mobilization to Revolution.”

dipandang sebagai respons yang wajar atau bahkan sah dalam mempertahankan kelompoknya.

Dengan demikian, peran media sosial dan penyebaran informasi provokatif tidak hanya berfungsi sebagai pemicu sesaat, tetapi sebagai faktor pembentuk (enabling factor) kekerasan politik di Kabupaten Sampang. Dalam perspektif Charles Tilly, media sosial telah menjadi bagian dari repertoar kontestasi politik kontemporer yang mempercepat eskalasi konflik, memperluas jangkauan kekerasan, dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap konflik elektoral ketika tidak diimbangi dengan literasi digital dan mekanisme pengendalian informasi yang efektif.

Ketujuh, faktor ekonomi dan politik uang dalam praktik politik lokal turut berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi konteks yang sangat penting dalam memahami fenomena ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang tercatat sebesar sekitar 20,83 % pada tahun 2024, menjadikannya salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.¹⁰³

Keterbatasan ekonomi sebagian masyarakat membuat praktik pemberian uang, barang, atau bantuan menjadi hal yang dianggap lumrah dalam proses pemilu. Dalam konteks pemilu yang kompetitif, pemberian insentif materiil seperti uang atau bantuan sering kali dipandang sebagai kompensasi yang diharapkan oleh pemilih yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama ketika kebutuhan ekonomi mendesak. Oleh karena itu, strategi politik uang tidak hanya memengaruhi pilihan politik warga, tetapi juga

¹⁰³ Darmawan, "20.83% of the Population in Sampang Regency Is Classified as Poor."

menciptakan tekanan sosial dan konflik laten ketika distribusi tidak merata atau terdapat perbedaan kepentingan antarpending. Seorang warga menyampaikan:

“Mon adek pak apa apa nah, oreng jiah biasa lok teremah yeh sakek ateh lah mas, apa pole pas taoh tetangge nah olle, le jiah bisa deddi rebut”

“Kalau tidak ada apa-apanya, orang biasanya kecewa. Apalagi kalau tahu tetangga dapat, bisa jadi ribut.”¹⁰⁴

Selain itu, politik uang juga memperlemah nilai-nilai demokrasi substantif karena pilihan politik lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi jangka pendek dibandingkan visi dan program kandidat. Kesenjangan ekonomi yang tinggi, sebagaimana tercermin dari tingginya angka kemiskinan di Sampang, mendorong praktik politik yang pragmatis dan membuka ruang konflik ketika ekspektasi ekonomi masyarakat tidak terpenuhi. Sampang.

Kapasitas sumber daya politik menjadi elemen krusial dalam memahami kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang. Tilly menegaskan bahwa aktor politik yang memiliki akses terhadap sumber daya baik material maupun simbolik memiliki kemampuan lebih besar untuk memobilisasi massa dan mempertahankan dominasi politik. Dalam konteks Sampang, sumber daya politik tidak hanya mencakup uang dan massa, tetapi juga pengaruh sosial yang dimiliki oleh kiai, blater, dan elite lokal.

Temuan peneliti mengenai praktik politik uang menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Sampang dengan tingkat kemiskinan mencapai 20,83% menjadi faktor struktural yang memfasilitasi penggunaan sumber daya material dalam

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Humaidi Warga Sampang pada Tanggal 14 Desember 2025

proses pemilu. Pernyataan informan bahwa "*kalau tidak ada apa-apanya, orang biasanya kecewa*" mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap kompensasi material sebagai bagian dari pertukaran politik. Hal ini sejalan dengan argumen Tilly bahwa dalam kondisi keterbatasan ekonomi, sumber daya material menjadi alat yang efektif untuk memobilisasi dukungan politik, sekaligus menciptakan ketergantungan struktural yang melanggengkan relasi patronase.

Selain sumber daya material, pengaruh sosial yang dimiliki oleh kiai dan blater merupakan aset politik yang tidak kalah penting. Kiai, dengan otoritas religius dan moral, memiliki legitimasi kultural yang memungkinkan mereka mengarahkan pilihan politik jamaah tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik secara langsung. Sebagaimana dinyatakan oleh Khoiri et al., figur berpengaruh seperti kiai dan blater hampir selalu menentukan kemenangan kandidat dalam pelaksanaan pemilu di Madura, termasuk Sampang.¹⁰⁵ Temuan ini mengonfirmasi konsep Tilly mengenai *political opportunity structure*, di mana aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya simbolik dapat memanfaatkan struktur kesempatan politik untuk mempertahankan dominasi mereka.¹⁰⁶

Selanjutnya, kapasitas sumber daya massa juga menjadi indikator penting dalam kekerasan politik elektoral di Sampang. Jaringan pesantren dan komunitas lokal yang terikat pada figur kiai membentuk basis massa yang solid dan mudah dimobilisasi.

¹⁰⁵ Khoiri et al., "The Role of Kiai and Blater in the Regional Election in Madura: Discourse on Legal Culture."

¹⁰⁶ Tilly, "From Mobilization to Revolution."

D. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Politik Elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang

Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya mengenai bentuk dan dinamika kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang, berbagai insiden kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa proses pemilu di tingkat lokal berlangsung dalam situasi sosial-politik yang rawan konflik. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pencegahan dan penanganan yang sistematis guna menjaga stabilitas sosial, melindungi keselamatan masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan politik elektoral menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan rangkaian tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, berbagai langkah telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta aktor-aktor lokal lainnya dalam merespons potensi dan eskalasi kekerasan politik elektoral diantaranya sebagai berikut:

Pertama, peran penyelenggara pemilu dalam pencegahan kekerasan elektoral seperti KPU dan Bwaslu, memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan politik elektoral. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi aturan pemilu, pengawasan tahapan pemilu, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah. Sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, sekaligus menekan potensi konflik yang dapat muncul selama proses pemilu. Seorang penyelenggara pemilu menyampaikan:

*“Kami berusaha melakukan sosialisasi dan pengawasan sejak awal supaya tidak terjadi gesekan di masyarakat.”*¹⁰⁷

Penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya KPU dan Bawaslu, memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan elektoral melalui tiga pilar utama: sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kedua lembaga ini memiliki kewenangan untuk memantau setiap tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, sekaligus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.¹⁰⁸

Upaya sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan literasi politik dan mencegah konflik di tingkat akar rumput. Seperti diungkapkan informan: *“Kami berusaha melakukan sosialisasi dan pengawasan sejak awal supaya tidak terjadi gesekan di masyarakat.”* Lembaga Survei Indonesia membuktikan bahwa daerah dengan intensitas sosialisasi tinggi mengalami insiden konflik elektoral yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan sosialisasi minimal. Hal ini menunjukkan efektivitas edukasi pemilih dalam menekan potensi kekerasan.¹⁰⁹

Implementasi koordinasi keamanan pemilu 2019 menunjukkan hasil positif. Kepolisian Republik Indonesia melaporkan deployment lebih dari 450.000 personel keamanan yang berhasil mengantisipasi 328 titik rawan konflik melalui koordinasi intensif antara Polri, TNI, KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Data ini

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Aliyanto ketua KPU Sampang pada Tanggal 16 Desember 2025

¹⁰⁸ BPK RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39117/uu-no-7-tahun-2017>.

¹⁰⁹ Lembaga Survei Indonesia, “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019” (LSI, 2019), <http://www.lsi.or.id/publikasi/evaluasi-penyelenggaraan-pemilu-2019>.

mengindikasikan penurunan insiden kekerasan elektoral dibandingkan pemilu sebelumnya, membuktikan efektivitas pendekatan kolaboratif.¹¹⁰

Namun, terdapat kendala struktural yang menghambat optimalisasi peran penyelenggara pemilu. Lembaga Survei Indonesia mengidentifikasi keterbatasan sumber daya finansial dan SDM sebagai hambatan utama, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang mengalami kekosongan pengawasan. Rasio pengawas terhadap TPS yang tidak ideal membuka celah terjadinya pelanggaran dan kekerasan elektoral. Selain itu, tekanan dari elite politik lokal berupa intimidasi dan intervensi terhadap penyelenggara pemilu di tingkat daerah semakin memperlemah independensi dan efektivitas pengawasan.¹¹¹

Kedua, koordinasi dengan aparat keamanan, aparat keamanan berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan pemilu. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang, Komandan Kodim 0828 Sampang bersama Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sampang dan unsur Forkopimda melakukan patroli bersama ke sejumlah lokasi strategis sebagai upaya memastikan kesiapan dan keamanan infrastruktur yang akan digunakan dalam Pilkada. Patroli ini mencakup pengecekan kesiapan personel dan fasilitas di markas keamanan di tiap kecamatan, serta gudang logistik pemilu untuk memastikan pengamanan dan distribusi berjalan aman dan lancar. Sinergi TNI-Polri ini juga dimaksudkan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang hari-H Pilkada.¹¹²

¹¹⁰ Kepolisian Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2019" (Mabes Polri, 2019), <https://www.polri.go.id/publikasi>.

¹¹¹ Indonesia, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019."

¹¹² Pendim0828, "Patroli Bersama Dandim dan Kapolres Sampang: Menyongsong Pilkada 2024 dengan Keamanan dan Sinergi," *Kodim 0828/Sampang*, 2024,

Koordinasi antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan telah dilakukan secara intens, terutama menjelang hari pemungutan suara, dengan penempatan petugas di titik-titik strategis untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan. Seorang penyelenggara pemilu menjelaskan:

“Kami selalu berkoordinasi dengan aparat, terutama di daerah yang rawan.”¹¹³

Berdasarkan hasil temuan penelitian, aparat keamanan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama seluruh tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang. Koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan unsur TNI dan Polri menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah potensi gangguan keamanan dan eskalasi konflik politik elektoral. Dalam praktiknya, Komandan Kodim 0828 Sampang bersama Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sampang serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan patroli bersama ke sejumlah lokasi strategis sebagai bentuk kesiapsiagaan keamanan menjelang Pilkada.

Patroli bersama tersebut mencakup pengecekan kesiapan personel keamanan, fasilitas markas TNI dan Polri di tingkat kecamatan, serta pengamanan gudang logistik pemilu. Langkah ini tidak hanya bertujuan memastikan distribusi logistik berjalan aman dan lancar, tetapi juga berfungsi sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi kerawanan konflik. Kehadiran aparat keamanan secara langsung di lapangan menjadi sinyal simbolik bagi masyarakat bahwa negara hadir untuk menjamin keamanan proses demokrasi, sekaligus menekan potensi tindakan provokatif dari aktor-aktor politik tertentu.

<https://kodimsampang.com/2024/11/26/patroli-bersama-dandim-dan-kapolres-sampang-menyongsong-pilkada-2024-dengan-keamanan-dan-sinergi/>.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Aliyanto ketua KPU Sampang pada Tanggal 16 Desember 2025

Temuan peneliti menunjukkan bahwa koordinasi antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dilakukan secara intens, terutama menjelang hari pemungutan suara. Penempatan personel keamanan di titik-titik strategis, seperti lokasi kampanye, Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta wilayah yang dikategorikan rawan konflik, dipandang sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan. Seorang penyelenggara pemilu menyampaikan, “Kami selalu berkoordinasi dengan aparat, terutama di daerah yang rawan.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemetaan kerawanan menjadi dasar utama dalam pola pengamanan Pilkada di Kabupaten Sampang.

Namun demikian, analisis data lapangan menunjukkan bahwa pendekatan aparat keamanan dalam menangani konflik politik elektoral cenderung bersifat preventif dan reaktif, dengan penekanan pada pengamanan fisik dan stabilitas jangka pendek. Sinergi lintas unsur melalui patroli bersama memang efektif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya kekerasan terbuka, tetapi belum sepenuhnya diiringi dengan strategi pengelolaan konflik yang bersifat substantif. Pengamanan yang dilakukan lebih berorientasi pada pengendalian situasi di permukaan, sementara dinamika konflik yang berakar pada persaingan politik, relasi patronase, dan ketegangan antarpending support belum sepenuhnya disentuh oleh pendekatan keamanan.

Dengan demikian, koordinasi antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan di Kabupaten Sampang dapat dinilai berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan Pilkada. Akan tetapi, efektivitas pengamanan tersebut masih bersifat situasional dan jangka pendek. Tanpa diiringi upaya penanganan konflik yang lebih komprehensif dan berbasis pencegahan struktural, peran aparat keamanan berpotensi

hanya menjadi instrumen stabilisasi sementara, sementara potensi konflik politik elektoral tetap terbuka untuk muncul kembali pada momentum politik berikutnya.

Ketiga, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan meredam konflik politik elektoral di Kabupaten Sampang. Dengan otoritas moral dan sosial yang dimiliki, tokoh-tokoh ini sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antarwarga dan antarpengikut kandidat. Seorang tokoh masyarakat menuturkan:

*“Kalau sudah mulai panas, kami biasanya dipanggil untuk menenangkan supaya tidak melebar.”*¹¹⁴

Hasil peneliti menunjukkan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah serta meredam konflik politik elektoral di Kabupaten Sampang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai figur yang memiliki legitimasi moral dan sosial tinggi, sehingga sering menjadi mediator ketika ketegangan politik mulai meningkat di tingkat akar rumput. Dalam praktiknya, peran mereka mencakup upaya pendekatan interpersonal, penenangan suasana, serta penyampaian pesan damai agar konflik tidak meluas ke bentuk kekerasan yang lebih sistemik. Sebagaimana pernyataan tokoh masyarakat tersebut.

Peran tokoh agama memiliki nilai kuat mengenai fungsi ulama dalam meresolusi konflik budaya kekerasan di masyarakat berbudaya Madura. Lebih khusus, ulama dipandang sebagai pendidik, pemberi nasehat, dan panutan yang dapat mengarahkan masyarakat untuk menahan diri dari tindakan kekerasan, bahkan ketika konflik sangat potensial terjadi. Dalam konteks carok suatu bentuk kekerasan yang bermotifkan harga

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Jakfar Sodik Tokoh Masyarakat pada Tanggal 13 Desember 2025

diri di masyarakat berbudaya Madura ulama mampu memberikan penjelasan bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan oleh ajaran agama maupun hukum positif, sehingga memberikan landasan moral bagi masyarakat untuk menghindari perilaku destruktif.¹¹⁵ Hal ini relevan dengan konteks Sampang, di mana pesan dan nasehat tokoh agama seringkali berperan sebagai medium regulatif nilai sosial untuk mencegah eskalasi konflik politik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas peran tokoh agama dan tokoh masyarakat bersifat kondisional. Ketika tokoh agama atau tokoh masyarakat terlibat secara langsung dalam politik praktis, legitimasi mereka sebagai mediator dapat menjadi terpecah. Keterlibatan politis ini dapat menimbulkan persepsi bias, sehingga beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak lagi menganggap nasihat mereka netral atau objektif. Kondisi ini berpotensi menciptakan polarisasi baru yang justru memperbesar konflik, terutama jika pesan damai yang disampaikan dipandang menguntungkan satu pihak politik tertentu.

Selanjutnya, minimalnya institutional support dan mekanisme formal untuk memfasilitasi mediasi informal membuat peran tokoh masyarakat sering kali tergantung pada kapasitas personal masing-masing tokoh. Ketergantungan yang demikian berisiko memperlemah efektivitas penyelesaian konflik kelak, karena pendekatan informal cenderung tidak terdokumentasi dan tidak memiliki mekanisme pemantauan yang jelas. Oleh karena itu, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari sistem penyelesaian konflik yang lebih komprehensif tidak

¹¹⁵ Abdul Ghofur, "Peran Ulama Sebagai Resolusi Konflik Carok Di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Lumajang," n.d., 1–12.

hanya sebagai entitas moral di komunitas, tetapi juga sebagai komplementer terhadap mekanisme formal yang akuntabel.

Keempat, upaya mediasi dan penyelesaian konflik secara informal, penyelesaian konflik politik elektoral di Kabupaten Sampang lebih banyak dilakukan melalui mekanisme informal dibandingkan jalur hukum formal. Mediasi dilakukan oleh tokoh masyarakat, aparat desa, atau tokoh agama untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik meluas. Seorang warga menyampaikan:

“Biasanya diselesaikan secara kekeluargaan supaya tidak panjang urusannya.”

116

Pendekatan ini dinilai efektif dalam meredam konflik jangka pendek, namun belum menyentuh akar permasalahan kekerasan elektoral secara struktural. Temuan peneliti ini sejalan dengan beberapa studi terdahulu yang mengkonfirmasi dominasi pendekatan informal dalam penyelesaian konflik di Sampang dan wilayah Madura pada umumnya. Ahnaf (2015) dalam penelitiannya tentang politik lokal dan konflik keagamaan di Sampang menegaskan bahwa dinamika konflik di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh peran tokoh masyarakat dan struktur kesempatan politik lokal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat jalur hukum formal, masyarakat Sampang cenderung mengedepankan mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal.

Preferensi terhadap penyelesaian informal ini diperkuat oleh temuan Maskuri yang memetakan strategi penyelesaian konflik di Sampang yang terdiri dari mediasi, rekonsiliasi, relokasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dari berbagai strategi tersebut,

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Humaidi Warga Sampang pada Tanggal 14 Desember 2025

mediasi dan rekonsiliasi yang bersifat informal menjadi pendekatan yang paling sering digunakan dalam tahap awal konflik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sampang memiliki preferensi kuat terhadap penyelesaian yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat lokal daripada menempuh jalur litigasi formal.¹¹⁷

Pendekatan kekeluargaan yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini memiliki akar budaya yang kuat dalam tradisi masyarakat Madura. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi informal merupakan praktik sosial yang telah lama dilegitimasi secara kultural, khususnya melalui peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai penjaga harmoni sosial.¹¹⁸ Dalam konteks Kabupaten Sampang, pendekatan ini diposisikan sebagai alternatif dari jalur hukum formal dengan tujuan utama mencegah konflik berkepanjangan dan meminimalisir eskalasi kekerasan horizontal. Filosofi yang mendasarinya adalah pemahaman bahwa konflik horizontal dipandang sebagai persoalan internal komunitas yang seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, bukan melalui intervensi kekuasaan formal yang berpotensi memperkeruh relasi sosial.¹¹⁹

Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian ini, efektivitas pendekatan informal tersebut perlu dikritisi secara lebih mendalam. Peneliti menemukan bahwa meskipun mekanisme kekeluargaan mampu meredam konflik dalam jangka pendek dan mencegah kekerasan terbuka, penyelesaian semacam ini cenderung bersifat

¹¹⁷ Fita Mustafida, M Fahrudin Andriyansyah, and Dian Mohammad Hakim, "Sunni-Shia Conflict Resolution Strategy And Its Impact On Harmonizing The Society: Evidence From Sampang, Madura," *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies* 33, no. 3 (2024): 423–30.

¹¹⁸ Abd Hannan and Zainuddin Syarif, "Perspektif Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Dan Penyelesaian Konflik Keagamaan Di Madura ; Sebuah Tinjauan Sosiologi" 23, no. 2 (2023).

¹¹⁹ Adi Gunawan, "The Community Conflict Settlement With Customary Law And Local Wisdom Approaches And Law No . 7 Of 2012 Concerning Handling Of Social Conflicts" 11, no. 2 (2022): 834–43.

pragmatis dan berorientasi pada stabilitas semu. Konflik elektoral yang terjadi di Kabupaten Sampang tidak sepenuhnya disebabkan oleh persoalan relasi antarindividu, melainkan berkaitan erat dengan kontestasi kekuasaan, relasi patronase politik, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya politik. Pendekatan informal yang hanya berfokus pada perdamaian sosial tanpa menyentuh dimensi struktural berpotensi menutup ruang evaluasi kritis terhadap aktor-aktor politik yang terlibat.

Selain itu, peneliti juga mencatat bahwa proses mediasi informal yang bergantung pada otoritas tokoh masyarakat tidak selalu berjalan secara netral dan transparan. Dalam beberapa kasus, posisi tokoh penengah justru berada dalam jejaring politik tertentu, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih menekankan pada kompromi sosial daripada keadilan substantif. Minimnya dokumentasi dan ketiadaan mekanisme pengawasan membuat penyelesaian konflik secara kekeluargaan sulit dievaluasi keberlanjutannya. Akibatnya, konflik yang telah “diselesaikan” berpotensi muncul kembali pada momentum elektoral berikutnya dalam bentuk yang serupa atau bahkan lebih kompleks.

Dengan demikian, meskipun pendekatan kekeluargaan memiliki legitimasi budaya dan fungsi stabilisasi sosial yang kuat, ketergantungan berlebihan pada mekanisme informal justru dapat menghambat upaya penyelesaian konflik politik elektoral secara komprehensif. Diperlukan integrasi antara pendekatan kultural dan mekanisme formal yang akuntabel agar penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada perdamaian jangka pendek, tetapi juga mampu menangani akar permasalahan struktural secara berkelanjutan.

Kelima, penanganan pelanggaran dan kekerasan oleh lembaga berwenang, Penanganan terhadap pelanggaran dan kekerasan politik elektoral dilakukan melalui mekanisme pelaporan dan penindakan oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sering kali terkendala oleh bukti yang terbatas, tekanan sosial, serta kekhawatiran akan dampak konflik yang lebih luas. Seorang penyelenggara pemilu mengungkapkan:

“Banyak pelanggaran sulit diproses karena tidak ada saksi yang berani bicara.”

120

Kondisi ini menyebabkan sebagian pelanggaran tidak ditindak secara tegas, sehingga menurunkan efek jera dan memungkinkan praktik kekerasan terus berulang. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional juga menjadi faktor yang memperkuat struktur kesempatan politik bagi kekerasan elektoral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan menyeluruh di seluruh wilayah Sampang, terutama di daerah-daerah yang memiliki jaringan patronase kuat. Pernyataan penyelenggara pemilu bahwa "banyak pelanggaran sulit diproses karena tidak ada saksi yang berani bicara" menunjukkan bahwa ketakutan masyarakat terhadap aktor informal telah melumpuhkan mekanisme formal pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menciptakan apa yang disebut Tilly sebagai *culture of impunity*, yaitu situasi di mana pelaku kekerasan politik merasa aman dari sanksi hukum karena lemahnya penegakan aturan.¹²¹

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Aliyanto ketua KPU Sampang pada Tanggal 16 Desember 2025

¹²¹ Tilly, *The Politics of Collective Violence*.

Struktur kesempatan politik di Sampang juga diperkuat oleh pola penyelesaian konflik yang cenderung menggunakan mekanisme informal dibandingkan jalur hukum formal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilakukan oleh tokoh masyarakat, aparat desa, atau tokoh agama untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik meluas. Meskipun pendekatan ini dinilai efektif dalam meredam konflik jangka pendek, namun tidak menyentuh akar permasalahan kekerasan elektoral secara struktural. Kondisi ini sejalan dengan argumen Tilly dan Tarrow bahwa ketika mekanisme formal tidak berfungsi secara optimal, masyarakat cenderung menggunakan mekanisme informal yang justru memperkuat struktur kekuasaan patronase dan membuka ruang bagi berulangnya kekerasan politik di masa mendatang.¹²²

Dengan demikian, struktur kesempatan politik di Kabupaten Sampang terbentuk melalui kombinasi antara lemahnya kontrol institusional, dominasi aktor informal, keterbatasan penegakan hukum, dan pola penyelesaian konflik yang berbasis pada mekanisme informal. Kondisi ini tidak hanya membuka ruang bagi kekerasan politik elektoral, tetapi juga melanggengkan praktik patronase yang menjadi akar struktural dari kekerasan tersebut.

¹²² Tilly and Tarrow, *Contentious Politics*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang merupakan fenomena yang bersifat terstruktur, berlapis, dan tidak terjadi secara spontan. Kekerasan elektoral hadir dalam beragam bentuk yang saling berkaitan dan berkembang secara bertahap sepanjang proses pemilu. Bentuk-bentuk tersebut meliputi kekerasan non-fisik dan intimidasi sosial yang bekerja melalui tekanan moral dan psikologis, kekerasan simbolik berbasis budaya lokal yang memanfaatkan simbol, reputasi, serta kehadiran aktor informal sebagai instrumen intimidasi, serta kekerasan struktural yang beroperasi melalui relasi patronase politik sehingga membatasi otonomi pilihan politik masyarakat. Selain itu, kekerasan politik elektoral juga termanifestasi dalam bentuk kekerasan verbal dan polarisasi sosial yang memperuncing ketegangan antarpending, serta kekerasan digital melalui penyebaran hoaks dan narasi provokatif yang mempercepat eskalasi konflik di ruang publik. Keseluruhan bentuk kekerasan tersebut saling berkelindan dan, pada kondisi tertentu, bermuara pada kekerasan fisik sebagai puncak eskalasi konflik elektoral.

Kedua, kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait secara struktural dan kultural. Fanatisme politik berbasis tokoh, terutama yang bersumber dari otoritas religius kiai, membentuk legitimasi moral dan loyalitas politik yang berlebihan di tingkat akar rumput. Kondisi ini diperkuat oleh budaya patronase dan relasi kuasa lokal yang menciptakan

ketergantungan sosial-ekonomi serta tekanan politik terhadap masyarakat. Rendahnya pendidikan dan literasi politik warga turut meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi, intimidasi, dan mobilisasi emosional. Di sisi lain, lemahnya pengawasan serta penegakan aturan pemilu membuka ruang terjadinya kekerasan tanpa sanksi yang tegas. Persaingan elite politik lokal yang berlangsung secara intens dan emosional kerap mengeksternalisasi konflik elite menjadi konflik horizontal di tingkat masyarakat. Peran media sosial dalam menyebarkan informasi provokatif, hoaks, dan narasi kebencian semakin mempercepat eskalasi konflik, sementara kondisi ekonomi masyarakat dan praktik politik uang—yang diperkuat oleh tingginya tingkat kemiskinan—menjadi faktor tambahan yang memicu ketegangan akibat ekspektasi material yang tidak terpenuhi. Keseluruhan faktor tersebut menegaskan bahwa kekerasan politik elektoral di Sampang merupakan fenomena struktural yang berakar kuat pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan lokal.

Ketiga, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan politik elektoral pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang dilakukan melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, menjalankan peran strategis melalui sosialisasi, pengawasan tahapan pemilu, serta koordinasi lintas lembaga. Upaya tersebut diperkuat oleh sinergi aparat keamanan TNI–Polri melalui patroli bersama, pemetaan wilayah rawan konflik, serta pengamanan logistik dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menjaga stabilitas selama tahapan pemilu. Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan sebagai mediator informal dalam meredam ketegangan politik dengan memanfaatkan otoritas moral dan sosial

yang mereka miliki. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penanganan konflik politik elektoral masih didominasi oleh mekanisme informal dan kekeluargaan yang efektif dalam meredam konflik jangka pendek, tetapi belum menyentuh akar struktural kekerasan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kekerasan elektoral juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya keberanian saksi, tekanan dari aktor informal, serta lemahnya efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuatnya patronase politik, dominasi aktor informal, dan lemahnya kontrol institusional membentuk struktur kesempatan politik yang memungkinkan kekerasan elektoral terus berulang, sehingga diperlukan integrasi yang lebih komprehensif antara pendekatan kultural dan mekanisme formal yang akuntabel dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan politik elektoral di Kabupaten Sampang:

1. Penyelenggara pemilu perlu memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan aparat keamanan serta mengembangkan strategi pencegahan berbasis sosial-budaya.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendidikan demokrasi, memperkuat penegakan hukum, dan mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Tokoh agama dan masyarakat diharapkan mempromosikan demokrasi damai dan menghindari keterlibatan politik praktis.
4. Partai politik perlu menjalankan kampanye beretika dan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum formal.

5. Masyarakat diharapkan meningkatkan literasi politik dan bersikap kritis terhadap informasi media sosial.
6. Akademisi perlu melanjutkan penelitian dengan fokus pada media sosial dan politik identitas.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. "Politik Lokal & Otonomi Daerah." (*No Title*), 2014.

Aziz, Abd. "Polisi Usut Dugaan Kasus Provokasi Pilkada Sampang," n.d.

<https://jatim.antaranews.com/berita/843777/polisi-usut-dugaan-kasus-provokasi-pilkada-sampang>.

Bawaslu. "Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan 2024 Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia," 2024.

Bhirawa, Redaksi. "Diduga Tak Netral, Dua Lurah Dilaporkan Ke BKPSDM Sampang." *Harian Bhirawa*, 2024. <https://harianbhirawa.co.id/diduga-tak-netral-dua-lurah-dilaporkan-ke-bkpsdm-sampang/>.

Bisnis.com, Redaksi. "Keributan Jelang Pilkada Sampang 2024, Polisi Buru Pria Bercelurit." *Bisnis.Com*, 2024.

<https://surabaya.bisnis.com/read/20241126/531/1819308/keributan-jelang-pilkada-sampang-2024-polisi-buru-pria-bercelurit>.

Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Harvard university press, 1991.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.

Coser, L A. *Continuities in the Study of Social Conflict*. Free Press, 1967.

<https://books.google.co.id/books?id=IM2XAQAACAAJ>.

- . *Functions of Social Conflict*. Free Press Paperback. Free Press, 1964.
https://books.google.co.id/books?id=8roSUUrL_-8C.
- Creswell, J W, and C N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=gX1ZDwAAQBAJ>.
- Darmawan, Agus Dwi. “20.83% of the Population in Sampang Regency Is Classified as Poor.” *Databoks Katadata*. Katadata Insight Center, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/7d3a98295479246/2083-of-the-population-in-sampang-regency-is-classified-as-poor>.
- Fawaidi, Ach. “ELECTIONS IN MADURA: BETWEEN PEACEFUL TRADITIONS AND VIOLENT PRACTICES.” *Reflektika* 20, no. 1 (2025): 117–34.
- Ghofur, Abdul. “Peran Ulama Sebagai Resolusi Konflik Carok Di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Lumajang,” n.d., 1–12.
- Gunawan, Adi. “The Community Conflict Settlement With Customary Law And Local Wisdom Approaches And Law No . 7 Of 2012 Concerning Handling Of Social Conflicts” 11, no. 2 (2022): 834–43.
- Gurr, Ted Robert. *Why Men Rebel*. Routledge, 2015.
- Hakim, Lukman. “Hasil Terbaru Survei Pilbup Sampang 2024 Versi Elsipol,” n.d.
<https://surabaya.inews.id/read/523514/ini-hasil-terbaru-survei-pilbup-sampang-2024-versi-elsipol-pasca-insiden-mengerikan>.
- Hannan, Abd -. “Agama, Kekerasan, Dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai Dan Kekuasaan Blater Dalam Pertarungan Politik

Lokal Madura.” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2 (2018): 187.

<https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-02>.

Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. “Perspektif Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Dan Penyelesaian Konflik Keagamaan Di Madura ; Sebuah Tinjauan Sosiologi” 23, no. 2 (2023).

Huntington, Samuel P. *The Third Wave*. Vol. 199. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

Indonesia, Kepolisian Republik. “Laporan Kinerja Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2019.” Mabes Polri, 2019. <https://www.polri.go.id/publikasi>.

Indonesia, Lembaga Survei. “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019.” LSI, 2019. <http://www.lsi.or.id/publikasi/evaluasi-penyelenggaraan-pemilu-2019>.

Istifarin, I. “Fenomena Politik Kekerasan Dalam Pilkadaes Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura.” Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

JSN, Admin. “Black Campaign, Dua Akun TikTok Di Sampang Mendapat Tanggapan Serius Dari Jubir Tim Jimad Sakteh.” *Jatimsatunews.Com*, 2024. <https://www.jatimsatunews.com/2024/10/black-campaign-dua-akun-tiktok-di.html>.

Khoiri, Ach, Avien Zakaria, Ihya Ulumuddin, Muhammad Ahsin Lana, and Ach Robithul Islam. “The Role of Kiai and Blater in the Regional Election in Madura: Discourse on Legal Culture.” *Trunojoyo Law Review* 6, no. 2 (2024): 211–33.

KPU. “Portal Pemilihan Pilkada 2024.” *Info Pemilu KPU Republik Indonesia*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024.

<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>.

Mafindo. “Siaran Pers: Hoaks Meningkat Pada Pemilu 2024, Awas Berulang Di Pilkada,” n.d. <https://mafindo.or.id/2024/08/30/siaran-pers-hoaks-meningkat-pada-pemilu-2024-awas-berulang-di-pilkada/>.

Miles, M B, A M Huberman, and J Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2018.

<https://books.google.co.id/books?id=fjh2DwAAQBAJ>.

Mochammad Fajar Nur. “Pilkada Berdarah Di Sampang: Alarm Pentingnya Mitigasi Konflik,” n.d. <https://tirto.id/pilkada-berdarah-di-sampang-alarm-pentingnya-mitigasi-konflik-g5Yc>.

Mustafida, Fita, M Fahrudin Andriyansyah, and Dian Mohammad Hakim. “Sunni-Shia Conflict Resolution Strategy And Its Impact On Harmonizing The Society: Evidence From Sampang, Madura.” *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 33, no. 3 (2024): 423–30.

Natalia, Mediani Dyah. “Cek Fakta: Ricuh Di Sampang Karena Surat Suara Sudah Tercoblos,” n.d.

<https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/02/14/643/1164845/cek-fakta-muncul-video-ricuh-di-sampang-karena-surat-suara-sudah-tercoblos-ini-pernyataan-resmi-kpu-sampang>.

News, BBC. “Kasus Pengeroyokan Di Sampang Berujung Kematian Pendukung Calon Bupati – Apa Motif Di Balik Insiden Itu?,” n.d. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5yrxg8ljyxo>.

- Nuary, Alfin. “Permasalahan C6 Masih Jadi Dinamika Di Pilkada Sampang,” n.d.
<https://rri.co.id/sampang/pilkada-2024/1149721/permasalahan-c6-masih-jadi-dinamika-di-pilkada-sampang>.
- Nurish, Amanah. “Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 21, no. 1 (2019): 31.
<https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>.
- Pendim0828. “Patroli Bersama Dandim dan Kapolres Sampang: Menyongsong Pilkada 2024 dengan Keamanan dan Sinergi.” *Kodim 0828/Sampang*, 2024.
<https://kodimsampang.com/2024/11/26/patroli-bersama-dandim-dan-kapolres-sampang-menyongsong-pilkada-2024-dengan-keamanan-dan-sinergi/>.
- Rahman, Praditya Fauzi. “Kronologi Lengkap Pembacokan Hingga Tewas Saksi Cabup Sampang.” *DetikJatim*, 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7650529/kronologi-lengkap-pembacokan-hingga-tewas-saksi-cabup-sampang>.
- RI, BPK. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39117/uu-no-7-tahun-2017>.
- Sampang, KPU. “Publikasi KPU Kabupaten Sampang.” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, 2024. <https://kab-sampang.kpu.go.id/>.
- Scott, James C. “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia.” *American Political Science Review* 66, no. 1 (1972): 91–113.
- Sila, Muhammad Adlin. “Kiai Dan Blater: Antara Kesalehan Dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Lokal Di Madura.” *Studia Islamika* 26, no. 1 (2019): 185–200.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023. <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpp/>.
- Tilly, Charles. "From Mobilization to Revolution." In *Collective Violence, Contentious Politics, and Social Change*, 71–91. Routledge, 2017.
- . *Regimes and Repertoires*. University of Chicago Press, 2010.
- . *The Politics of Collective Violence*. Cambridge University Press, 2003.
- Tilly, Charles, and Sidney G Tarrow. *Contentious Politics*. Oxford University Press, 2015.
- Tomoning, Yeremias. "POLITIK LOKAL Di TINGKAT DESA1 (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 6 (2015).
- Ubaid, Ahmad Hasan, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Jl Raya, Sumenep-pamekasan K M Patean, Jawa Timur, et al. "Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Warga Kepulauan Madura" 4, no. 3 (2022): 322–29.
- Yin, Robert K. "Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)," 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : **GHUFRON**

Tempat, tanggal lahir : Sampang, 14 April 2000

Alamat : Jl. Pelenggiyan Kedungdung Sampang Jawa Timur

Nomer HP : 0817-1782-4554

Pendidikan : 1. MI Miftahul Mustarsyidin Kedungdung Sampang
2. MTs Miftahul Mustarsyidin Kedungdung Sampang
3. MA Baitussholeh Kedungdung Sampang

Pengalaman : 1. Mengajar di Miftahul Mustarsyidin
2. Petugas KPPS Pemilu 2024
3. Talent Channel Mata Pena

PEDOMAN WAWANCARA

Aspek	Pertanyaan
Kekerasan Non-Fisik dan Intimidasi Sosial	1. Bagaimana Bapak melihat bentuk tekanan politik yang dialami masyarakat selama Pemilu 2024? 2. Apakah Bapak pernah merasakan tekanan dalam menentukan pilihan politik? 3. Apakah ada bentuk intimidasi terhadap relawan saat melakukan kegiatan kampanye?
Kekerasan Simbolik Berbasis Budaya Lokal	1. Bagaimana bentuk tekanan simbolik yang terjadi di lapangan? 2. Apakah kondisi tersebut dianggap hal biasa oleh masyarakat?
Kekerasan Struktural melalui Relasi Patronase	1. Bagaimana pengaruh arahan tokoh terhadap pilihan politik masyarakat? 2. Apa yang membuat warga mengikuti arahan politik tokoh tertentu?
Kekerasan Verbal dan Polarisasi Sosial	1. Bagaimana situasi interaksi antarpendingung selama pemilu? 2. Apa dampak perbedaan pilihan terhadap hubungan sosial?
Kekerasan Digital dan Penyebaran Hoaks	1. Bagaimana peran media sosial dalam konflik politik? 2. Apa dampak hoaks terhadap situasi politik lokal?

Kekerasan Fisik sebagai Eskalasi Konflik	1. Bagaimana kekerasan fisik bisa terjadi dalam Pilkada Sampang 2024?
Fanatisme Politik Berbasis Tokoh	1. Seberapa besar pengaruh tokoh agama dalam pilihan politik masyarakat?
Budaya Patronase dan Ketergantungan Sosial	1. Mengapa masyarakat cenderung mengikuti patron politik?
Lemahnya Pendidikan Politik	1. Bagaimana tingkat pemahaman politik masyarakat?
Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Aturan	1. Apa kendala utama dalam penegakan aturan pemilu?
Pencegahan dan Mediasi Konflik	1. Bagaimana konflik biasanya diselesaikan di masyarakat? 2. Mengapa jalur itu lebih dipilih?

Hasil Wawancara

1. Informan Tokoh Agama (Kiai)

Informan: Kiai Ahmad

Kriteria: Tokoh agama / kiai

Pertanyaan:

Bagaimana Bapak melihat bentuk tekanan politik yang dialami masyarakat selama Pemilu 2024 di Kabupaten Sampang?

Jawaban:

“Tekanan itu tidak pernah keras atau memaksa. Biasanya seorang kiai hanya memberi gambaran tentang pasangan calon. Tapi jamaah itu sudah merasa sendiri. Kalau berbeda pilihan, rasanya tidak enak sebagai murid. Saya pribadi tidak pernah memaksa, tapi memang ada kiai di desa lain yang mengarahkan pilihan.”

Pertanyaan:

Bagaimana konflik biasanya diselesaikan di masyarakat?

Jawaban:

“Kalau sudah mulai panas, kami dipanggil untuk menenangkan supaya tidak melebar.”

Informan: Jakfar Sodik

Kriteria: Tokoh agama

Pertanyaan:

Seberapa besar pengaruh tokoh agama dalam menentukan pilihan politik masyarakat?

Jawaban:

“lok taoh yeh mas, mon oresen pelean kiai, jamaah jiah biasanah total abela, kadeng bedhe warga atanyah dek kiai jiah mas meleh sapah ben jiah siap e dukung bik warga mas”

2. Informan Tim Kampanye

Informan: Ali Wafa

Kriteria: Tim kampanye

Pertanyaan:

Apakah terdapat tekanan atau intimidasi dalam aktivitas kampanye di lapangan?

Jawaban:

“Kadang cukup hadir saja sudah ada tekanan. Orang sudah tahu itu wilayah siapa. Tidak perlu bicara, masyarakat langsung mengerti. Saya sering disarankan warga untuk tidak masuk daerah tertentu supaya tidak terjadi kericuhan.”

Pertanyaan:

Bagaimana pengaruh persaingan elite terhadap situasi di tingkat akar rumput?

Jawaban:

“Kalau elite sudah bersaing keras, pendukung di bawah ikut panas.”

3. Informan Relawan

Informan: Abd. Waffar

Kriteria: Relawan

Pertanyaan:

Apakah relawan pernah mengalami tekanan saat menjalankan aktivitas politik?

Jawaban:

“Kami pernah ditegur supaya jangan kampanye di daerah tertentu. Tidak diancam, tapi maksudnya jelas.”

Pertanyaan:

Bagaimana situasi interaksi antarpendukung di masyarakat?

Jawaban:

“Mon akandeh politik jiah biasa nas panas ben gampang panas mas, yeh mon sala kandheh mas bisa rebut”

Pertanyaan:

Bagaimana peran media sosial dalam konflik politik?

Jawaban:

“Di grup WhatsApp banyak kabar yang tidak jelas asalnya, tapi langsung dipercaya dan menyebar.”

4. Informan Masyarakat Umum

Informan: Khoiruddin

Kriteria: masyarakat / warga

Pertanyaan:

Apakah masyarakat merasa bebas menentukan pilihan politik?

Jawaban:

“Aslinah adhe se maksa langsung mas, tapeh kebanyakan masyarakat jiah la paham koduk nurok sapah, soallah mon e katelak bideh pelean pas deddi rasan mas”

Pertanyaan:

Bagaimana situasi sosial menjelang pemilu?

Jawaban:

“Sudah biasa tiap pemilu ada orang-orang tertentu yang jaga. Masyarakat ikut saja biar aman.”

Pertanyaan:

Bagaimana situasi interaksi antarpendukung selama pemilu?

Jawaban:

“Biasanah mon bedeh pelean warga abek jaga jarak mas, takok telopot sala ngucak”

5. Informan Masyarakat Umum

Informan: Humaidi

Kriteria: Masyarakat umum

Pertanyaan:

Mengapa warga mengikuti arahan politik tokoh tertentu?

Jawaban:

“Bukan soal suka atau tidak calon, tapi ikut siapa yang ngajak. Kalau yang ngajak orang berpengaruh, warga ikut. Takut nanti kalau butuh bantuan tidak dibantu.”

Informan: Irsyad

Kriteria: Masyarakat umum

Pertanyaan:

Apa alasan utama warga mengikuti patron politik?

Jawaban:

“Warga jiah biasa nah norok ke sapah se bantu oreng jiah mas, mon tak norok takok degghi lok e bantu pole ben edina aghi”

Pertanyaan:

Apa dampak politik uang terhadap hubungan sosial?

Jawaban:

“Mon adek pak apa apa nah, oreng jiah biasa lok teremah yeh sakek ateh lah mas, apa pole pas taoh tetangge nah olle, le jiah bisa deddi rebut”

6. Informan Penyelenggara Pemilu

Informan: Aliyanto

Kriteria: Ketua KPU Kabupaten Sampang

Pertanyaan:

Bagaimana pengaruh arahan elite terhadap pemilih?

Jawaban:

“Kalau sudah ada arahan dari atas, warga biasanya ikut. Mereka takut nanti kalau ada apa-apa tidak dibantu.”

Pertanyaan:

Bagaimana potensi kekerasan fisik dalam pemilu?

Jawaban:

“Kalau sudah banyak tekanan dan isu, sedikit pemicu saja bisa jadi keributan. Seperti kejadian di Ketapang Laok, pemicunya penghadangan, lalu pendukung tidak terima sampai ada korban meninggal.”

Pertanyaan:

Apa kendala utama dalam pengawasan dan penegakan aturan pemilu?

Jawaban:

“Kami sering serba salah. Kalau ditindak, ada tekanan. Kalau dibiarkan, konflik bisa meluas.”

7. Informan Partai Politik

Informan: Pengurus PKB Kabupaten Sampang

Kriteria: Partai politik

Pertanyaan:

Bagaimana dampak hoaks terhadap situasi politik lokal?

Jawaban:

“Hoaks itu cepat sekali menyebar dan sulit dikendalikan. Dampaknya ke masyarakat besar, bisa bikin panik dan curiga ke penyelenggara.”

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Foto dengan informan tokoh agama Sampang



Foto dengan informan warga umum Sampang



Foto dengan informan relawan



Foto dengan informan tim kampanye



Foto dengan informan masyarakat umum



Foto dengan informan tokoh masyarakat



Foto dengan informan tim kampanye



Foto dengan informan pengurus partai